



RENJA 2023

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU**



MALINAU, 2022





PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Raja Pandita RT.10 No.95 (0553) 21278 Malinau 77554

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 600/175/DPU.PR-PERKIM

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka sebagai tindak lanjut hasil Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Musrenbang Tingkat Kabupaten, Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang Nasional Tahun 2021, maka perlu membentuk tim penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023;
 - b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini karena tugas dan fungsinya dipandang mampu dan sesuai untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 539);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten

Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65);

16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TENTANG PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Anggota : 1. Kabid. Pertanahan
2. Kabid. Sumber Daya Air
3. Kabid. Bina Marga
4. Kabid. Penataan Ruang
5. Kabid. Pertamanan dan
Pemakaman
6. Kabid. Cipta Karya
7. Kepala UPTD
8. Kasubbag. Umum dan
Kepegawaian

9. Kasubbag.....

9. Kasubbag. Sungram
10. Kasubbag. Keuangan
11. Kasubbag. Tata Usaha UPTD
12. Kasi. Penataan Bangunan
13. Kasi. Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Bersih
14. Kasi. Perumahan dan Permukiman
15. Kasi. Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan
16. Kasi. Bangunan Jalan dan Jembatan
17. Kasi. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
18. Kasi. Pengembangan Sumber Daya Air
19. Kasi. Perencanaan Pengembangan SDA dan Irigasi
20. Kasi. Irigasi dan Rawa
21. Kasi. Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan
22. Kasi. Perencanaan Tata Ruang
23. Kasi. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang
24. Kasi. Pemakaman
25. Kasi. Pertamanan
26. Kasi. Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan
27. Kasi. Penyelesaian Permasalahan Tanah
28. Kasi. Pengadaan Tanah
29. Kasi. Pengukuran Tanah

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Menyusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan.....

- c. Melaksanakan evaluasi terhadap draf Rencana Kerja kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023.

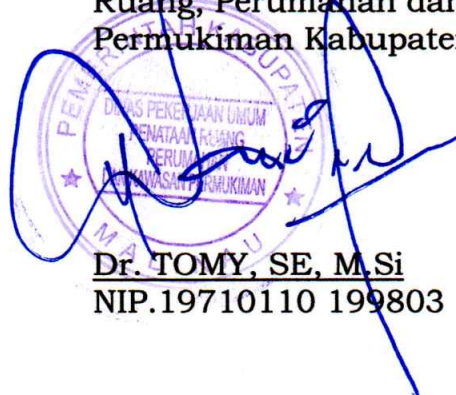
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023 harus memperhatikan petunjuk-petunjuk dan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 08 Maret 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau,



Dr. TOMY, SE, M.Si
NIP.19710110 199803 1 009

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Malinau
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau
3. Kepala Bappeda Kabupaten Malinau di Malinua
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Malinau di Malinau
5. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di Malinau
6. Masing-masing yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan tugas yang cukup berat dan menuliskan hasilnya dalam bentuk dokumen, yang berjudul ***“RENCANA KERJA (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023”***.

Renja ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Malinau, yang mana selanjutnya akan disingkat dengan DPU-PR.PERKIM. Selain itu juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Rencana Kerja DPU-PR.PERKIM, Kabupaten Malinau Tahun 2023 ini merupakan salah satu bagian dari Rencana Strategi (RENSTRA) dan Kelanjutan Rencana Kerja DPU-PR.PERKIM Tahun 2022.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renja ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Kami menyadari, Renja ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, kami berharap, dengan Renja ini semua kebijakan dan program yang kami susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman bagi DPU-PR.PERKIM Kabupaten Malinau maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan yang telah membantu memberikan saran-saran dan pendapat untuk perbaikan Rencana Kerja (Renja) DPU-PR.PERKIM Kabupaten Malinau, kami ucapkan terimakasih.

Malinau, 18 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU



NIP. 19700401 200112 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU.....	8
2.1 A. Pengolahan Data Dan Informasi.....	8
2.1 B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	36
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	44
BAB V PENUTUP	45



DAFTAR TABEL

- TABEL T-C.29** Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (tahun berjalan).
- TABEL T-C.30** Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- TABEL T-C.31** Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.
- TABEL T-C.32** Usulan Program dan Kegiatan Dari Musrenbang dan Pokir DPRD Tahun 2023.
- TABEL T-C.33** Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun.
- TABEL T-C.36** Indikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kabupaten Malinau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah / daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Renja Perangkat Daerah Merupakan perumusan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan satuan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun , yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau merupakan tahapan awal yang dilakukan sebelum dituangkan menjadi Dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Malinau . Berdasarkan rencana kerja tahunan tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan RKA dan DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau .

Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, Renja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang dikelola Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau .

Proses penyusunan Renja ini dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD.
- b. Rumusan program/kegiatan didalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah.
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.

- d. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan pengeluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada diatasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Renstra Dinas Pekerjaan Umum penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dengan RPJMD. Renstra K/L dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, dan dengan Renja dengan Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau diuraikan sebagai berikut .Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten malinau mengacu pada Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sesuai dengan peraturan Daerah tentang perangkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementrian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/kabupaten /Kota, dan Hasil kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja (*RENJA*) Dinas Pekerjaan Umum Penataaan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 berisi kebijakan Pembangunan Infrastruktur yaitu Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Penataan Ruang, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Pertanahan dan UPTD serta kegiatan-kegiatan pendukungnya, baik yang akan dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi, maupun APBD Kabupaten Malinau.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas Pembangunan Tahun 2023 dan sasaran Pembangunan yang hendak dicapai dengan mengacu kepada agenda Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau yang perlu diselesaikan pada tahun 2023. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang Pembangunan Infrastruktur, yang meliputi Bidang Bina Marga (Program Penyelenggaraan Jalan), Bidang Sumber Daya Air (Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Bidang Cipta Karya (program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Kawasan Permukiman) Bidang Penataan Ruang (Program Penyelenggaraan Penataan Ruang), Bidang Pertamanan Dan Pemakaman (Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya), Bidang Pertanahan (Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota)

Berdasarkan program tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai Fungsi Pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi seluruh bidang Pekerjaan Umum baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan DPU-PR.PERKIM, karena memuat seluruh kebijakan public yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebagai instansi pemerintah.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 dilengkapi dengan Lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta Indikasi Pagu untuk

masing-masing Program.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 3004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050.4/56/Hukum tanggal 4 Maret 2022, tentang Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud sebagai Pedoman dan Informasi bagi Pengambil Keputusan melalui landasan yang kuat dan sistematis dalam merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Malinau, dan membuat komitmen pada Program Prioritas yang bersifat lintas bidang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini juga bertujuan untuk menjamin kesesuaian, ketepatan dalam mendukung Perumusan Kebijakan dan Pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2023, sehingga sasarannya lebih ke arah pengendalian kegiatan yang berkelanjutan terarah dan terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 A. Pengolahan Data dan Informasi
- 2.1 B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 A. Pengolahan Data dan Informasi

1. Kondisi pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas PUPR PERKIM Kabupaten Malinau terbentuk pada tahun 2017 yang merupakan penggabungan dari Dinas PU, Penataan Ruang, Dinas Tata Kota dan Dinas Pertanahan. Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya selalu berkaitan dengan institusi formal dan nonformal. Koordinasi dan sinkronisasi antar Dinas merupakan program strategis dan prioritas. Gambaran umum kondisi pelayanan SKPD 5 tahun terakhir dapat dijabarkan dalam program kerja yang telah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, saluran drainase, dan berbagai fasilitas kebinamargaan lainnya.
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan irigasi dan fasilitas-fasilitas pengairan lainnya untuk lahan pertanian dan upaya-upaya pencegahan banjir.
3. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jaringan air minum/ air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih.
4. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan penerangan jalan.
5. Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat memberikan rekomendasi IMB serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.
6. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penataan taman kota dan area pemakanan.

2. Organisasi dan tata laksana perangkat daerah

Dasar hukum dari terbentuknya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Peraturan Bupati Malinau Nomor 69 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan structural dilingkungan dinas daerah Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Peraturan Bupati Malinau. Adapun bagan struktur organisasi DPUPRPERKIM Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

a. Bagan Organisasi

Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;

Dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas dan Fungsi

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah, dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
 - b. Penyusunan perencanaan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
 - c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;
 - d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya, Bina Marga, Pengairan, Tata Ruang, Pertamanan dan Pemakaman serta Pertanahan;

- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program kerja dan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Kabupaten malinau melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan pencapaian sasaran program;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Sekretariat, Bidang-bidang dan dan Subbidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- e. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- f. Melakukan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kebijakan teknis bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama dan memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, bina marga, sumber daya air, penataan ruang, pertamanan dan pemakaman, serta pertanahan dengan instansi terkait, Kabupaten, Kota, instansi vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan

- peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- j. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
 - k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat, Bidang dan Subbidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Sekretariat dan kebijaksanaan yang ada agar tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Subbagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masingmasing;
- d. Menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
- e. Menyelenggarakan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- g. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Umum Dan Kepegawaian berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- f. Mengadakan pemeliharaan bahan inventaris baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- g. Mengusulkan pegawai yang mendapatkan penghargaan dan pegawai mengikuti pelaksanaan ujian dinas;
- h. Mengusulkan dan menyampaikan pertimbangan dan sasaran tentang mutasi pegawai di lingkungan dinas;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Melakukan monitoring kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian di Kabupaten Malinau sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Subbagian Penyusunan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mengkoordinasi dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan

tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;

- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas;
- e. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Subbagian Penyusunan Program berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyusun Rencana Strategis (Rensta), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
- g. Menyusun Laporan Realisasi belanja langsung dan kegiatan skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Melakukan rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahannya sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan penyusunan program dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Subbagian Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun rencana anggaran rutin Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan;

- e. Melakukan pembayaran belanja rutin dan pembangunan sesuai ketentuan;
- f. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta berhasil guna dan berdayaguna;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas;
- i. Menyiapkan laporan keuangan secara periodik kepada pimpinan berkiatan dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawab subbagian keuangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian masalahnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai uraian tugas sebagai berikut

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- d. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- e. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang

- penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Cipta Karya, Penataan Bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman;
 - i. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih, serta perumahan dan pemukiman; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penataan Bangunan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, dan menyiapkan bahan perumusan kajian kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- c. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- e. Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pengaturan dan pengendalian perijinan bangunan;
- g. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang Penataan Bangunan;
- h. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang Penataan Bangunan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang Penataan Bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;

- j. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang Penataan Bangunan;
- k. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain cipta karya, pembangunan gedung;
- l. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
- m. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penataan Bangunan;
- n. Mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang ada hubungannya dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- b. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- c. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- d. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- e. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- f. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- g. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang penyehatan lingkungan

- pemukiman dan air bersih;
- j. Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain penyehatan lingkungan pemukiman dan air bersih;
 - k. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;
 - l. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Bersih;
 - m. Mengoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu kepada Instansi yang berhubungan dengan bidang tugas maupun pimpinan; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Perumahan dan Pemukiman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- b. Menyiapkan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- c. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- d. Mengoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada para staf sesuai dengan tugas masing-masing guna tercapainya sasaran yang telah ditentukan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- e. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perumahan dan pemukiman;
- f. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang perumahan dan pemukiman;
- g. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perumahan dan pemukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan survey, investigasi dan desain di bidang perumahan dan pemukiman;
- i. Melakukan pembinaan dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktifitas kerja staf;

- j. Menyiapkan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas seksi Perumahan dan Pemukiman;
- k. Mengambil langkah-langkah dan memberikan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Bina Marga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Bina Marga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pembangunan prasarana infrastruktur di Bidang Bina Marga;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Menyelenggarakan program pembangunan prasarana dan pemeliharaan jalan di Bidang Bina Marga;
- g. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis Bidang Bina Marga;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi, dan desain Bidang Bina Marga sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Perencanaan Bangunan Jalan

- dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
 - d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - e. Melaksanakan inspeksi pengujian kelayakan prasarana-prasarana;
 - f. Melaksanakan pemantauan dampak serta manfaat prasarana fisik;
 - g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan mengarsipkan data serta mendokumentasikan kegiatan perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
 - i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Bangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan serta penggantian jalan dan jembatan;
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara

memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;

- g. Menyiapkan bahan laporan secara periodik kepada pimpinan berkaitan dengan bidang tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. Mengarahkan penggunaan perijinan jalan dan jembatan;
- g. Melakukan peninjauan lokasi dan penanggulangan jalan atau jembatan akibat bencana alam;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis survey, investigasi dan desain pembangunan, dan rehabilitasi prasarana sumber daya air;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pengaturan pengelolaan sumber daya air;
- d. Melaksanakan pemberian supervisi dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya air secara optimal dan berkesinambungan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan serta pengendalian pengelolaan sumber daya air;
- f. Melaksanakan administrasi dan perizinan sumber daya air termasuk garis sempadan sungai;
- g. Melaksanakan konservasi dan penetapan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/ pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Sumber Daya Air dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- j. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- k. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kegiatan Bidang Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- b. Melakukan pengelolaan data dasar dan sistem informasi perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- c. Menyusun aspek teknis dan spesifikasi pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- d. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- e. Melakukan kegiatan pelaksanaan survey, pemetaan, penelitian, penyelidikan, studi kelayakan, dan analisa dampak lingkungan dalam rangka pengembangan sumber daya air dan irigasi;
- f. Mendistribusikan tugas kepada staf sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- g. Membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin serta produktivitas kerja staf;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- i. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan irigasi dan rawa;
- b. Melaksanakan dan mengawasi pengelolaan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan rawa;
- c. Melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan rawa;

- d. Melakukan penatagunaan dan bina manfaat irigasi, rawa, dan embung;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi teknis kegiatan pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi dan rawa;
- f. Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan pengguna air;
- g. Melakukan kegiatan pembinaan pembangunan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan rawa;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- i. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- j. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan pelaksanaan pengembangan sumber daya air
- b. Melakukan kegiatan pelaksanaan dan supervisi pengembangan sumber daya air yang didalamnya termasuk sungai, waduk, bendungan dan Pembangkit listrik tenaga Air (PLTA);
- c. Melaksanakan pengembangan, operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air di wilayah sungai;
- d. Melakukan kegiatan pelaksanaan pengendalian banjir dan daya rusak air;
- e. Melaksanakan pengembangan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan drainase;
- f. Melakukan pembinaan dan bantuan teknis dalam pengembangan sumber daya air;
- g. Menyiapkan rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan kawasan wilayah sungai serta pengusahaan sumber daya air;
- h. Melakukan kegiatan pengelolaan hidrologi, pengawasan dan pengendalian kualitas air permukaan;

- i. Melakukan upaya pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam;
- j. Melakukan inventarisasi aset/penatagunaan aset prasarana dan sarana sumber daya air;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan bidang lainnya sebatas dengan kewenangan yang diberikan oleh pimpinan agar tercipta kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
- l. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- m. Melakukan bimbingan, pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengembangan Sumber Daya Air sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai bidang tugasnya.

Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan program kerja Bidang Penataan Ruang;
- b. Menginisiasi pembentukan forum koordinasi penataan ruang dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang daerah, pengelolaan data geospasial dan perpetaan pada lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- e. Mensosialisasikan kebijakan penataan ruang secara luas serta menyediakan media yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penataan ruang atau terlibat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur penataan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;
- g. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi serta menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah secara berjenjang;
- h. Melaksanakan peninjauan kembali, evaluasi dan revisi serta penyusunan dan penetapan rencana umum maupun rencana detail tata ruang;

- i. Melaksanakan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, rencana tata ruang kecamatan dan desa serta kawasan tertentu yang diprioritaskan sebagai pusat pertumbuhan kawasan;
- j. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan data geospasial dan perpetaan;
- k. Mempersiapkan perencanaan tata ruang serta melaksanakan supervisi terhadap pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ruang wilayah agar terwujud akselerasi, keterpaduan dan kesinambungan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- l. Melaksanakan fungsi penataan ruang dalam rangka memberikan dukungan khusus bagi pelaksanaan program prioritas daerah;
- m. Menyusun dan menyampaikan pertimbangan teknis kepada pimpinan dalam rangka pengambilan keputusan kebijakan penataan ruang;
- n. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Bidang Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan tugas perencanaan tata ruang;
- d. Melaksanakan penyusunan, evaluasi, revisi dan penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- e. Memberi dukungan data dan informasi dalam rangka penyusunan dan penetapan rencana tata ruang lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
- f. Melakukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan di bidang perencanaan tata ruang;
- g. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perencanaan Tata Ruang;
- h. Mensosialisasikan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan perundang-undangan;

- i. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur perencanaan tata ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek penataan ruang;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan Tata Ruang untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara reguler serta peningkatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah;
- d. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyusun rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. Melakukan sosialisasi tentang peraturan dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta menyebarluaskan informasi tentang penataan ruang kepada masyarakat;
- f. Melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan pihak lain dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Melaksanakan kegiatan pengidentifikasian terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- h. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Pengendalian pemanfaatan ruang melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- j. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai

- peraturan dan pedoman yang berlaku;
- k. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka untuk peningkatan penyelenggaraan penataan ruang di daerah; dan
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan program kegiatan Seksi Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan jabatannya;
- c. Menghimpun data pembangunan dan data geospasial dari berbagai sumber dalam rangka penyediaan, pengembangan, peningkatan ketersediaan data berbasis spasial;
- d. Melaksanakan survey lapangan dalam rangka menghimpun data dan informasi untuk meningkatkan ketersediaan data serta untuk keperluan pemetaan;
- e. Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan dan penelaahan dokumen serta pengawasan pemanfaatan data geospasial dan pemetaan;
- f. Menyiapkan peta – peta tata ruang untuk kepentingan kedinasan dan/atau untuk keperluan pihak lain berdasarkan surat permohonan yang telah disetujui pimpinan;
- g. Melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, pemutahiran, pengamanan dan penyebaran data geospasial;
- h. Menyusun Standar Pelayanan Penyebaran Informasi Geospasial dan Perpetaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- i. Menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Data Geospasial dan Perpetaan;
- j. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur pengolahan data geospasial dan perpetaan melalui pelatihan, workshop, dan bimtek;
- k. Melakukan pembinaan dan penilaian serta pengarahan kepada bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
- l. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;

- m. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Data Geospasial dan Perpetaan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pertamanan dan Pemakaman dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyiapkan perumusan kebijakan dan kajian kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- c. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- e. Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- g. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- h. Menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- j. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survey, investigasi dan desain di bidang pertamanan, pemakaman, dan penerangan jalan umum dan energi baru terbarukan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pertamanan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi pertamanan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi pertamanan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi pertamanan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di seksi pertamanan;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di seksi pertamanan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pemakaman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Pemakaman;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Pemakaman;

- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Pemakaman;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Pemakaman;
- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Pemakaman;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan, dan penyiapan perumusan kajian kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar kegiatan dapat terlaksana tepat waktu;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- e. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- g. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- h. Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;

- i. Menyusun dan melaksanakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penerangan Jalan Umum dan Energi Baru Terbarukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Bidang Pertanahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengarahkan penyusunan pedoman pelaksanaan kegiatan di Bidang Pertanahan, Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- b. Merencanakan kebijakan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- c. Menyusun rencana langkah-langkah operasional kegiatan Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah di bidang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- d. Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- f. Memberi petunjuk atau arahan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- g. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep pedoman, norma, standar, prosedur, dan petunjuk teknis bidang untuk mewujudkan penyelenggaraan dan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan pemerintah yang baik, pelayanan yang cepat, tepat berdasarkan kebutuhan aparatur dan masyarakat;
- h. Mengevaluasi program dan kegiatan di Bidang Pertanahan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah;
- i. Melaporkan hasil pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pengukuran tanah dan penyelesaian permasalahan tanah kepada atasan;

- j. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar diketahui keberhasilan dan kegagalan serta permasalahannya dan memberi solusi efektif kepada bawahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengadaan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan pembinaan dan penelitan kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan pedoman untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- e. Menyusun dan mengoreksi konsep naskah dinas lainnya hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun SK Bupati tentang pengadaan tanah, SK Bupati tentang tim satuan Identifikasi dan Inventarisasi tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- i. Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan Seksi Pengadaan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Pengukuran Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan program Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan peraturan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- e. Melaksanakan kegiatan pengukuran tanah yang diusulkan SKPD;
- f. Memeriksa dan memverifikasi peta hasil ukuran di lapangan;
- g. Menyusun rencana pembutan data base tanah dan aset;
- h. Membimbing dan mengarahkan pelaksanaan tugas Seksi Pengukuran Tanah berdasarkan tugas agar terlaksana sesuai program;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Pengukuran Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pengukuran Tanah dilapangan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

Kepala Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan;
- b. Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik;
- c. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
- d. Menginventarisasi tanah aset Pemda yang bersengketa;
- e. Meneliti dan menganalisa laporan pengaduan permasalahan tanah;
- f. Melakukan koordinasi dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan tanah;
- g. Memfasilitasi musyawarah antar pihak yang bermasalah untuk mendapat

kesepakatan;

- h. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi peraturan pertanahan;
- i. Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- j. Menyiapkan bahan laporan hasil kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Permasalahan Tanah untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya dan melaporkannya kepada pimpinan.

3. Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau jenis pelayanan serta capaian kinerja pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan tahun 2021 sesuai peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota maka Pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 2 (dua) jenis pelayanan yang meliputi:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Dengan realisasi Layanan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target PD 2021	Realisasi Tahun 2021
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari – hari	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah	56 %	61,99 %
2.	Penyediaan pelayanan	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang	21,10 %	22,83 %

	pengolahan air limbah domestik	Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten /Kota		
Nilai Rata-Rata Capaian SPM DPU.PR-PERKIM				42,41 %

2.1 B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bagi Kabupaten Malinau, infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing di dunia internasional, disamping sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan energi. Melalui kebijakan dan komitmen pembangunan infrastruktur yang tepat, maka hal tersebut diyakini dapat membantu mengurangi masalah kemiskinan, mengatasi persoalan kesenjangan antar-kawasan maupun antar-wilayah, memperkuat ketahanan pangan, dan mengurangi jumlah pengangguran dalam suatu negara.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum mempunyai manfaat langsung untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan, karena semenjak tahap konstruksi telah dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekaligus menggerakkan sektor riil. Sementara pada masa layanan, berbagai *multiplier* ekonomi dapat dibangkitkan melalui kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur pekerjaan umum yang telah terbangun tersebut pada akhirnya juga akan dapat memperbaiki kualitas permukiman.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan terjabar dalam table T-C.29 sebagai berikut:

T.C 2.9
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2022
KABUPATEN MALINAU

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU

KODE							URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2021 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7 / 6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN DASAR									
							PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
							Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman									
X	XX	01	0	00	00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100 %							
X	XX	01	2	02	00		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100 %		100 %	100 %				
X	XX	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	88 Orang	87 Orang	86 Orang	86 Orang	100%	88 Orang	261 Orang	297%
X	XX	01	2	08	00		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100 %		100 %	100 %				
X	XX	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	172 Orang	163 Orang	171 Orang	171 Orang	100%	287 Orang	621 Orang	361%
X	XX	01	2	06	00		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	100 %		100 %	100 %				
X	XX	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang disediakan	5 Item	5 Item	5 Item	5 Item	100%	- Item	10 Item	200%
X	XX	01	2	06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	89 Item	49 Item	43 Item	43 Item	100%	89 Item	181 Item	203%
X	XX	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Item	7 Item	4 Item	4 Item	100%	- Item	11 Item	275%
X	XX	01	2	06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	100.000 Lembar	100.000 Lembar	45.290 Lembar	45.290 Lembar	100%	38.046 Lembar	183.336 Lembar	183%
X	XX	01	2	06	07		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	2.727 Liter	- Liter	- Liter	- Liter		- Liter	- Liter	0%
X	XX	01	2	06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	56 Kali	35 Kali	40 Kali	40 Kali	100%	56 Kali	131 Kali	234%
X	XX	01	2	09	00		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %		100 %	100 %				
X	XX	01	2	09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil dinas yang di dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	3 Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	3 Unit	300%
X	XX	01	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100%	- Unit	2 Unit	10%
X	XX	01	2	09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Unit	3 Unit	- Unit	- Unit	0%	- Unit	3 Unit	300%
X	XX	01	2	05	00		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2021 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
X	XX	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	6 Kecamatan	5 Kecamatan	- Kecamatan	- Kecamatan	0%	- Kecamatan	5 Kecamatan	83%
X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %							
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat yang diperlukan	13 Unit	5 Unit	-	-		-	5 Unit	38%
X	XX	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumah luas Lahan yang Disediakan	3 Ha	-	-	-		1,2 Ha	1 Ha	40%
X	XX	01	2	03	00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %				
X	XX	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	140 Bidang	30 Bidang	40 Bidang	40 Bidang	100%	18 Bidang	88 Bidang	63%
X	XX	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60 Bidang	-	10 Bidang	10 Bidang	100%	-	10 Bidang	17%
1	03	02	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	0,10							
1	03	02	2	01	00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	02	2	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah dokumen yang dihasilkan	15 Dokumen	-	-	-		10 Dokumen	10 Dokumen	67%
1	03	02	2	01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan	3.050 m	-	4.000 m	4.000 m	100%	-	4.000 m	131%
1	03	02	2	02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lcapaian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas jaringan irigasi yang dibangun	60 Ha	-	-	-		60 Ha	60 Ha	100%
1	03	03	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	1							
1	03	03	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa Yang di Bangun Jaringan Perpipaan	2 Desa	5 Desa	3 Desa	3 Desa	100%	1 Desa	9 Desa	450%
1	03	05	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	0							
1	03	05	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah layanan pengolahan air limbah domestik	3 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	18 Unit	32 Unit	1067%
1	03	08	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung	0							
1	03	08	2	01	00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase capaian Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1		100 %	100 %				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2021 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Lama waktu survei	12 Bulan	- Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	24 Bulan	200%
1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	2 Unit	-	-		1 unit	3 Unit	300%
1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung yang dirawat / dipelihara	9 unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	6 Unit	12 Unit	133%
1	04	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	04	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pengembangan Perumahan	1							
1	04	02	2	03	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	1		-					
1	04	02	2	03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus yang di bangun	7 unit	-	-	-		-	-	0%
1	04	03	0	00	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	0							
1	04	03	2	03	00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase capaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1		100 %	100 %				
1	04	03	2	03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dok	-	-	-		-	-	0%
1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	33 unit	35 Unit	23 Unit	23 Unit	100%	- Unit	58 Unit	176%
1	03	07	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0							
1	03	07	2	01	00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan	1		100 %	50 %				
1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Penantaaan Jalan Lingkungan	857 m2	-	3 Paket	2 Paket	50%	2.878 m2	2.880 m2	336%
1	03	09	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1							
1	03	09	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase capaian Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah Waktu Pemeliharaan yang dilaksanakan	12 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	12 Bulan	100%
1	03	09	2	01	04	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah pengadaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	195 Unit	150 Unit	17 Item	15 Item	88%	242 Unit	407 Unit	209%
1	03	12	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	1							
1	03	12	2	01	0	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase capaian Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 Kali Rapat Konsultasi	1 Kali Rapat Konsultasi	-	-		1 Kali Rapat Konsultasi	2 Kali Rapat Konsultasi	200%
1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Perencanaan RTH Publik yang dihasilkan	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	2 Dokumen	33%
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang tersosialisasi	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	100%		6 Kali Sosialisasi	200%
1	03	12	2	02	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	1		100 %	100 %				
1	03	12	2	02	03	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%		2 Dokumen	200%
1	03	12	2	03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1		100 %	100 %				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2021 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	15 Kali Rapat	-	-	-		10 Kali Rapat	10 Kali Rapat	67%
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	6 Peta	2 Peta	13 Peta	13 Peta	100%	-	15 Peta	250%
1	03	12	2	04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	12	2	04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	1 Dokumen	-	-	-		-	-	0%
1	03	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Orang	-	15 Dokumen	15 Dokumen	100%	-	15 Dokumen	300%
1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	0							
1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1		100 %	100 %				
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	4 Dokumen	7 Dokumen	350%
1	03	10	2	01	08	Rekontruksi Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	18 Km	17 Km	0,350 Km	0,350 Km	100%	9 Km	26 Km	150%
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang dipelihara	1 Km	-	-	-		-	-	0%
1	03	10	2	01	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang di pelihara	60 m	-	-	-		-	-	0%
1	03	10	2	01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Jaksa Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di tangani darurat	12 bulan	-	-	-		-	-	0%
						UPTD									
X	XX	01	0	00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1							
X	XX	01	2	08	00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		100 %	100 %				
X	XX	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	117 Orang	44 Orang	86 Orang	86 Orang	100%	-	130 Orang	111%
X	XX	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	1		100 %	100 %				
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	1 Tahun	-	-	-		-	-	0%
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material UPTD PU yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%		8 Jenis	200%
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang telah dilaksanakan	15 Kali	15 Kali	-	-		-	15 Kali	100%
X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1		100 %	100 %				
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan	13 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	-	9 Unit	69%
X	XX	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar Yang di lakukan Pemeliharaan	23 Unit	-	-	-		-	-	0%
X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan pengadaan	1		100 %	100 %				
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Item yangPeralatan disediakan	1 Unit	-	-	-		-	-	0%
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang disediakan	3 Unit	-	-	-		-	-	0%
X	XX	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang disediakan	4 Unit	-	7 Unit	7 Unit	100%	8 Unit	15 Unit	375%
1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten								
1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat KemantapanJalan kabupaten			100 %	100 %				

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2020 (n-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2021 (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN BERJALAN					
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2022)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)				
1	03	10	2	01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Jumlah Bahan Bakar yang disediakan	-	-	33.645	Liter	33.645	Liter	100%	140.806	Liter	174.451	Liter	#DIV/0!

Dengan mengacu realisasi APBD dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman TA 2023, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan ada beberapa program/kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya banyak hal yang menjadi kendala dan salah satunya ialah beberapa kegiatan yang mengalami gagal lelang dikarenakan tidak adanya peminat pada paket pekerjaan. Sehingga implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ialah akan menghambat usulan baru yang akan dilaksanakan tahun berikutnya karena mengingat kegiatan yang belum memenuhi target kinerja akan diusulkan lagi pada tahun selanjutnya.

Dalam tahun mendatang tentunya akan merumuskan lagi indikator keberhasilan yang menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Kota secara keseluruhan sehingga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi dan kegiatan yang dapat dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dari segi pelayanan terhadap masyarakat maupun terhadap pihak-pihak lainnya yang terkait urusan kedinasan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman telah berusaha sebaik mungkin, namun begitu ada beberapa kendala yang harus segera diatasi untuk meningkatkan pelayanan yang prima, yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurang pemahaman seluruh *stakholder* terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang berhubungan tugas dan fungsi pokok DPU-PR.PERKIM.
2. Sering terjadinya kendala-kendala teknis dan non teknis selama tahun anggaran berlangsung.
3. Terbatasnya kondisi keuangan daerah sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan,

Adapun hasil pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah akan terlampir pada table T-C.30 sebagai berikut:

Tabel T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di seluruh Kabupaten /Kota	55,60%	56,00%	56,40%	65,80%	56,00%	61,97%	66,50%	71,10%	Laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi dan pertumbuhan cakupan pelayanan air minum tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah	21,00%	21,10%	21,20%	21,30%	21,84%	10,56%	11,05%	11,70%	Keterbatasan Anggaran APBD, maka skema kerjasama pendanaan dari provinsi sangat diperlukan untuk meningkatkan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Malinau mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat.

Di samping itu, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah dibidang pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman berperan melakukan pendampingan kepada Perangkat dan Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, seperti pelibatan dalam pengawasan teknis, supervisi, panitia pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Meskipun demikian, selama menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di bidang pekerjaan umum tentu akan menemukan beberapa masalah yang akan menjadi kendala dalam melakukan tugas pemerintahan tersebut dan hal itu akan menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada demi tetap menjaga keberadaan suatu organisasi.

Isu-isu Strategis yang menjadi fokus utama perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas jalan yang sudah terbangun
- 2) Optimalisasi pemeliharaan jalan melalui penyediaan alat besar
- 3) Optimalisasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan pada kawasan yang masih terisolasi
- 4) Peningkatan layanan dan kualitas daerah irigasi dengan membangun serta memelihara konektivitas jaringan irigasi pada wilayah pertanian
- 5) Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan Perkotaan.
- 6) Peningkatan Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan di kawasan permukiman.
- 7) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
- 8) Penyediaan sarana, prasarana dan utilitas umum diperuntukkan untuk menunjang fungsi hunian.
- 9) Perbaikan rumah tidak layak huni.
- 10) Peningkatan pengelolaan drainase lingkungan.
- 11) Peningkatan penanganan Air Limbah Domestik.
- 12) Peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang
- 13) Optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- 14) Peningkatan kualitas data spasial tata ruang.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Adapun Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ini akan membandingkan antara rancangan awal RKPD TA 2023 dengan hasil analisis kebutuhannya selama tahun berjalan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau kecocokan antara program/kegiatan yang berjalan dengan RKPD yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga diakhir tahun anggaran tidak terjadi penemuan-penemuan yang menyimpang dari RKPD.

Dalam Review ini akan memuat 12 Program, diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Penataan Bangunan Gedung

6. Program Kawasan Permukiman
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
10. Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
11. Program Pengembangan Perumahan
12. Program Pengembangan Permukiman.

Dari 12 program tersebut akan dijabarkan uraian kegiatannya masing-masing beserta nilai pagu indikatif/kegiatan yang akan terlampir dalam tabel T-C.31 berikut:

TABEL T-C.31
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Malinau

OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	34.624.424.392	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	44.124.424.392	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100%	9.904.424.392	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100%	9.904.424.392	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	88 orang	9.904.424.392	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Malinau	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	88 orang	9.904.424.392	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	1.990.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	1.040.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	150 Bidang 400 Patok	1.790.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	120 Bidang	1.040.000.000	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Inventarisasi dan monitoring aset Tanah Pemerintah Daerah	80 Bidang	200.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35%	650.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Orang yang Mengikuti Kegiatan Bimtek	10 Orang	200.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kegiatan Bimtek yang di Lakasanakan	-	-	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	6 Kecamatan	150.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi	-	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Malinau	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	15 Orang	300.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Malinau	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	-	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	64%	7.353.251.902	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat daerah	64%	9.079.298.550	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah item ATK yang disediakan	89 Item	700.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	89 Item	632.098.550	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Malinau	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100.000 Lbr	200.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Malinau	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	100.000 Lbr	200.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Komponen listrik yang tersedia	5 Item	80.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	5 Item	80.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	1.500 Kotak	430.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	1.500 Kotak	571.200.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Malinau	Jumlah bahan/Material yang tersedia	168.727 Liter	4.393.251.902	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Malinau	Jumlah bahan Logistik yang tersedia	201.250 Liter	6.201.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	94 Kali	1.550.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Malinau	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	119 Kali	1.395.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40%	2.921.490.898	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40%	25.472.144.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan yang tersedia	11 unit	1.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan yang tersedia	2 unit	2.150.000.000	
	Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Malinau	Jumlah Alat Besar yang disediakan	3 Unit	6.250.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kabupaten Malinau	Jumlah Alat Besar yang disediakan	7 Unit	24.870.544.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin disediakan	15 Alat	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah alat yang diperlukan	57 Unit	321.600.000	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumah luas Lahan yang Disediakan	#REF!	1.521.490.898	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumah luas Lahan yang Disediakan	-	-	

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang tersedia	6 unit	1.250.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah Gedung atau Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Unit	30.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100%	11.195.257.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase NON ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan	100%	13.329.927.450	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	264 Orang	11.195.257.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Malinau	Jumlah Non ASN yang diberikan Gaji	312 Orang	13.329.927.450	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45%	610.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45%	1.511.930.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Malinau	Jumlah mobil dinas yang dilakukan Pemeliharaan	2 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Kabupaten Malinau	Jumlah mobil dinas yang di dilakukan Pemeliharaan	1 Unit	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan	17 Unit	500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Malinau	Jumlah Kendaraan Oprasional Yang di lakukan Pemeliharaan	17 Unit	300.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kabupaten Malinau	Jumlah Alat Besar Yang di lakukan Pemeliharaan	27 Unit	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kabupaten Malinau	Jumlah Alat Besar Yang di lakukan Pemeliharaan	34 Unit	801.930.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah bangunan yang terpelihara	1 Unit	300.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah alat yang diperlihara	20 unit	160.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Malinau	Jumlah alat yang diperlihara	20 unit	60.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	10,67%	8.100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	10,67%	1.200.000.000	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun	100%	3.265.000.000	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun	100%	700.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5 Dokumen	450.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	500.000.000	
	Pembangunan Tanggul Sungai	Kabupaten Malinau	Panjang Tanggul Yang dibangun	325 m	1.080.000.000	Pembangunan Tanggul Sungai	Kabupaten Malinau	Panjang Tanggul Yang di bangun	-	-	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kabupaten Malinau	Panjang Normalisasi Yang dilaksanakan	6325 m	1.585.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kabupaten Malinau	Panjang Normalisasi Yang dilaksanakan	6325 m	1.485.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Kabupaten Malinau	Panjang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan	3050 m	150.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Kabupaten Malinau	Panjang kanal Yang Lakukan Pemeliharaan	3550 m	200.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase luas irigasi yang terbangun	100%	4.835.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase luas irigasi yang terbangun	100%	500.000.000	
	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Malinau	Luas jaringan irigasi yang dibangun	130 Ha	4.100.000.000	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Malinau	Luas jaringan irigasi yang dibangun	-	-	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Malinau	Luas Opreasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	115 Ha	735.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kabupaten Malinau	Luas Opreasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	115 Ha	500.000.000	
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	65,80%	1.600.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	65,80%	1.750.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	1 pkt	1.600.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	1 pkt	1.750.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	300.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4 Dok	750.000.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Malinau	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	100 SR	1.300.000.000	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kabupaten Malinau	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	50 SR	1.000.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	0,92%	300.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	-	-	

	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun	100%	300.000.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun	-	-	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten Malinau	Jumlah TPS-3R yang dibangun	1 unit	300.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kabupaten Malinau	Jumlah TPS-3R yang di bangun	-	-	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga bersanitasi layak	21,30%	2.100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga bersanitasi layak	21,30%	1.250.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPALD S yang terbangun	100%	2.100.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase SPALD S yang terbangun	100%	1.250.000.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Malinau	Jumlah Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4 Unit	2.100.000.000	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Malinau	Jumlah layanan pengolahan air limbah domestik	2 Unit	1.250.000.000	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36,64%	1.100.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	36,64%	1.850.000.000	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.100.000.000	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.850.000.000	
	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	jumlah Panjang Semenisasi Yang dibangun	596 m	1.100.000.000	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	jumlah gedung yang direhab	1.368 m2	3.350.000.000	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung	50%	6.650.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung	50%	6.100.000.000	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase bangunan pemerintah dan sarana prasarana publik yang direhab	100%	6.650.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Persentase bangunan pemerintah dan sarana prasarana publik yang direhab	100%	6.100.000.000	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Malinau	Jumlah Tim ahli Bangunan yang dibayarkan	3 orang	350.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	12 Bulan	200.000.000	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Pembangunan	1 Dok 3 unit	2.800.000.000	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	500.000.000	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah bangunan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai	13 unit	3.500.000.000	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dirawat / dipelihara	4 unit	5.400.000.000	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya	70%	1.900.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya	70%	800.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Persentase LPJU dan Pemakaman dalam Kondisi Baik	100%	1.900.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya		Persentase LPJU dan Pemakaman dalam Kondisi Baik	100%	800.000.000	
	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengandaan Operasional Pertamanan dan Pemakaman Umum	65 Unit	600.000.000	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungannya	Kabupaten Malinau	Jumlah Pengandaan Operasional Pertamanan dan Pemakaman Umum	65 Unit	200.000.000	
	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kabupaten Malinau	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	195 Unit 100 M	1.300.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Kabupaten Malinau	Jumlah pengadaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	165 Unit	600.000.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	48.680.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	100%	36.500.000.000	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase panjang jalan yang terbangun	100%	48.680.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota		Persentase panjang jalan yang terbangun	100%	36.500.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2 Dokumen	650.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	500.000.000	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	500.000.000	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	500.000.000	

	Pembangunan Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dibangun	0,5 Km	1.000.000.000	Pembangunan Jalan	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	-	
	Rekontruksi Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	26,141 Km	34.330.000.000	Rekontruksi Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	14,25 Km	33.700.000.000	
	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1 Km	1.000.000.000	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1 Km	1.000.000.000	
	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 km	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kabupaten Malinau	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	-	-	
	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Malinau	Panjang Jembatan yang Dibangun	120 M	8.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kabupaten Malinau	Panjang jembatan yang di bangun	-	-	
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1 Unit	1.000.000.000	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Kabupaten Malinau	Panjang Jembatan yang di pelihara	2 Unit	800.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah Waktu Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Jalan/Jembatan	12 Bulan	200.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Kabupaten Malinau	Jumlah Waktu Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan Jalan/Jembatan	-	-	
	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kabupaten Malinau	Jangka Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di tanggap darurat	12 bulan	1.000.000.000	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Kabupaten Malinau	Jangka Waktu Kesiap Siagaan Jalan dan Jembatan Yang di tanggap darurat	-	-	
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	65%	2.400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	65%	2.116.700.000	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	100%	975.000.000	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	100%	925.000.000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	1 Kali rapat	125.000.000	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	2 Kali Evaluasi RTR Desa	100.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Evaluasi Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	2 Kali Evaluasi RTR Desa	100.000.000	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Perencanaan RTH Publik	5 Dokumen	650.000.000	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Perencanaan RTH Publik	2 Dokumen	650.000.000	
	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang tersosialisasi	2 Kali Sosialisasi	75.000.000	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang yang tersosialisasi	2 Kali Sosialisasi	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	100%	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR	100%	300.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	2 Kali Rapat Koordinasi	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	2 Kali Rapat Koordinasi	250.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	2 Kali Rapat Koordinasi	50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR	-	-	
	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat	4 Kali Pelatihan	250.000.000	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Masyarakat	1 Kali Pelatihan	50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota		Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100%	825.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota		Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	100%	791.700.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	15 Kali Rapat	250.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	5 Kali Rapat	200.000.000	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	5 Album Peta	575.000.000	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang	4 Album Peta	591.700.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100%	100.000.000	
	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	-	-	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kabupaten Malinau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif	1 Laporan Pengendalian	100.000.000	
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Capaian Pengembangan Perumahan	55,30%	350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Capaian Pengembangan Perumahan	55,30%	200.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	100%	350.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	100%	200.000.000	

	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang di Bangun	7 unit	350.000.000	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Malinau	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang di Bangun	4 unit	200.000.000	
12	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	0,88%	1.100.000.000	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	0,88%	6.300.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	0,88%	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani	0,88%	6.300.000.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dok	150.000.000	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kabupaten Malinau	Jumlah dokumen yang dihasilkan	1 Dok	300.000.000,00	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Malinau	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	40 Unit	950.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kabupaten Malinau	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	86 Unit	2.600.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yaitu urusan Pekerjaan Umum. Selain pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum, dinas ini juga bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat. Adapun kegiatan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat adalah menerima dan menelaah usulan masyarakat dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malinau melalui kegiatan Musrenbang Kecamatan. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten juga menerima dan menelaah usulan program kegiatan dari para pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Asosiasi-asosiasi dan lain-lain. Selanjutnya usulan program dan kegiatan tersebut akan disortir berdasarkan kebutuhan prioritas daerah, tujuan-tujuan indikator yang ada dalam isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta menyesuaikan APBD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Berikut akan dilampirkan usulan program dan kegiatan dari Musrenbang dan Lembaga lainnya pada tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022 DARI MUSRENBANG & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA
KABUPATEN MALINAU

OPD : DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan / Alasan	keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	USULAN MUSREMBANG					
1	Pembebasan Lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Desa Malinau Kota	Luas lahan yang disediakan	2 Ha	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
2	Peningkatan Jalan dan Jembatan Apau Ping - Long Berini - Long Kemuat - Long Alango - Long Tebulo - Long Uli - Malinau	Kec. Bahau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
3	Pengaspalan Jalan Dalam Desa	Long Alango	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
4	Pembangunan Jembatan Besi Lalut Songan	Long Alango	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
5	Pengaspalan Jalan Meranti (Menuju SMAN 10 Malinau)	Long Alango	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
6	Pembangunan Jembatan Besi Lalut Songan	Long Alango	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
7	Pembangunan Jembatan Jalan Bawang Songan (Menuju SDN 001 Bahau Hulu	Long Alango	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
8	Pembangunan Jembatan Ulin Sungai Uli	Long Uli	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
9	Pembangunan Jembatan Pipa Baja Sungai Sekakan	Apau Ping	Panjang Jembatan yang dibangun	20 X 4 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
10	Pembangunan Jembatan Jalan Bawang Songan (Menuju SDN 001 Bahau Hulu	Long Alango	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
11	Jalan Usaha Tani long alango (Sebelah Kiri Sungai Melua)	Long Alango	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
12	Pembangunan Jembatan Ulin Sungai Uli	Long Uli	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
13	Pembukaan Jalan Usaha Tani Kiri Sungai tebulo	Long Tebulo	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
14	Pembangunan Jalan Menuju Ekowisata Long Tua	Apau Ping	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
15	Pembangunan Jembatan Pipa Baja Sungai Sekakan	Apau Ping	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
16	Pelatihan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Kec.Bahau Hulu	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
17	Pembukaan Jalan Darat Kecamatan menuju Long Jalan	Long Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
18	Pembangunan Jalan dari Kecamatan menuju Long Lake	Long Lake	Panjang Jalan yang ditingkatkan	50 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
19	Jembatan Konstruksi Beton	Long Jalan	Panjang Jembatan yang dibangun	40 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
20	Peningkatan Jalan Desa	Nahakramo	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
21	Jembatan Gantung	Long Rat	Panjang Jembatan yang dibangun	2 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
22	Pembangunan Jembatan Kontruksi Beton (Desa Nahakramo - Kantor Kecamatan)	Desa Nahakramo	Panjang Jembatan yang dibangun	100 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
23	Pembangunan Jembatan Usaha Tani	Mirau	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
24	Pembangunan Jembatan Konstruksi Beton Data Kipa	Tj. Nanga	Panjang Jembatan yang dibangun	20 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
25	Pembangunan Jembatan Sungai Permit	Nahakramo	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
26	Jembatan Gantung	Long Rat	Panjang Jembatan yang dibangun	2 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
27	Peningkatan Jalan Poros Kecamatan Tanjung Nanga - Metut	Tj. Nanga	Panjang Jalan yang ditingkatkan	40 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
28	Pembangunan Jembatan Kontruksi Beton (Desa Nahakramo - Kantor Kecamatan)	Desa Nahakramo	Panjang Jembatan yang dibangun	100 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang

29	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Mirau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
30	Pembangunan Jembatan Usaha Tani	Mirau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
31	Peningkatan Jalan (Tanjung Nanga - Langap)	Tj. Nanga	Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
32	Pembangunan Jembatan Konstruksi Beton Data Kipa	Tj. Nanga	Panjang Jalan yang ditingkatkan	20 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
33	Pemeliharaan Jalan Data Kipah	Tj. Nanga	Panjang Jalan yang ditingkatkan	30 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
34	Pembangunan Jembatan Sungai Permit	Nahakramo	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
35	Pembukaan Jalan Dalam Desa	Metut	Panjang Jalan yang di bangun	2 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
36	Pembuatan Gorong gorong jalan umum	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
37	PEMBANGUNAN BADAN JALAN GG BERINGIN 3 MENUJU GG BERINGIN 1	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 1500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
38	Peningkatan Jalan Dalam Desa	Desa Tanjung Keranjang	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
39	Pengaspalan Jl. Ex Holing Simpang RT 05 s/d Spg CMS	Desa Batu Lidung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
40	Jembatan sungai	Desa Pelita Kanaan	Panjang Jembatan yang dibangun	RT.04	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
41	Jembatan Kanal	Desa Malinau Hilir	Panjang Jembatan yang dibangun	RT 04	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
42	Jembatan Gantung	Desa Malinau Hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	RT.05	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
43	Jembatan layang jalan raja alam	Desa Malinau Kota	Panjang Jembatan yang dibangun	RT 7	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
44	Pembuatan Jembatan Jalan 2 Raja alam - swadaya	Desa Malinau Kota	Panjang Jembatan yang dibangun	RT 13	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
45	Pembuatan Jembatan Warga di kanal Irigasi	Desa Malinau Kota	Panjang Jembatan yang dibangun	RT 13	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
46	Jembatan Beton Sei Jambu Pembangunan	Desa Batu Lidung	Panjang Jembatan yang dibangun	RT 02	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
47	Rehab jalan Desa	Desa Pelita Kanaan	Panjang Jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
48	Pengaspalan Jl Gunung Bela RT 4	Desa Batu Lidung	Panjang Jalan yang dibangun	159 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
49	Pengaspalan Gg. Suryadinata	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang dibangun	1000	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
50	Peningkatan Jalan Ex Inhutani	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang dibangun	700	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
51	Semenisasi Agrowisata Pulau Betung	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
52	Gorong saluran Air	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Gorong	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
53	Perbaikan parit Jl.Padat karya (Jl.Tani)	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
54	Pembuatan Draenase Jl.poros RT.04	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
55	Pemeliharaan drainase jalan	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
56	Jembatan Gantung	Desa Malinau Hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	1	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
57	Peningkatan Jl.samping SPBU Perusda	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
58	Pembuatan Turab sungai sesayap kuala kabiran	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
59	Pengaspalan jalan samping SMAN 1	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	250	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
60	Pengaspalan jalan belakang tower	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	300	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

61	Pembuatan Jl.samping perumahan kodim	Desa Malinau Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6x400	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
62	PENIMBUNAN BADAN JALAN GG TEMBUS JALAN INTIMUNG	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 X 350 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
63	PENGASPALAN JALAN RT 01,16 DAN 17	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 200 M²	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
64	REHAB JALAN GANG MAWAR	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
65	PENINGKATAN JALAN AMBO JUNIAH	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 1000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
66	PENINGKATAN JALAN GG LANGSAT 2 USULAN PENGASPALAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
67	Peningkatan Jalan Sie Pulau Dian	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 1000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
68	PENAMBALAN SULAM ASPAL (REHAB JALAN ASPAL)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 100 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
69	SEMENISASI JALAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 300 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
70	PENINGKATAN BADAN JALAN DUYAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 2 KG	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
71	PERBAIKAN JALAN TROTOAR PENAMBAHAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
72	JEMBATAN LAYANG JALAN RAJA ALAM	Desa Malinau Kota	Panjang Jembatan yang dibangun	± 15 M²	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
73	ASPAL GANG BAMBU KUNING	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 215 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
74	PENIMBUNAN ALUN-ALUN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 5000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
75	REHAB SEMENISASI	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
76	PENINGKATAN JALAN (JALAN LAMA)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	450 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
77	PENINGKATAN JALAN DAERAH SMK 2	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	120 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
78	NORMALISASI PARET JALAN RAJA ALAM - BATU LIDUNG	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
79	PENIMBUNAN JALAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
80	PEMBUATAN JEMBATAN JALAN 2 (RAJA ALAM - SWADAYA)	Desa Malinau Kota	Panjang Jembatan yang dibangun	± 600 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
81	PEMBUATAN SIRING JALAN SWADAYA	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
82	PENINGKATAN BADAN JALAN MASJID - SMK	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 150 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
83	PEMBUATAN BADAN JALAN TEMBUS SWADATA - RAJA ALAM	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 150 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
84	PENYIRINGAN JALAN GANG ERWIN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
85	PEMBANGUNAN BADAN JALAN DAN SIRING BADAN JALAN (GG SAMPING RUMAH PAK FIRDAUS	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
86	PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN SIRING GG TENGUYUN TEMBUS SAMPING SD 04 (GANG TENGUYUN)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
87	PENIMBUNAN BADAN JALAN DAN SIRING BADAN JALAN (HIBAH TANAH PAK AGUS DAN H. SUBHAN)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
88	PENINGKATAN BADAN JALAN POROS TERMINAL (JLN. POROS TERMINAL)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
89	PENINGKATAN BADAN JALAN AMD	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
90	PENIMBUNAN JALAN (TANAH PERBATASAN WILAYAH RT 18 RT 17)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
91	PENINGKATAN JLN GG H.KADIR PELEBARAN ASPAL	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
92	PELEBARAN JALAN SEMENISASI MENUJU KOLAM DESA	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 KG M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

93	PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 350 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
94	PENGASPALAN JALAN DAENG BAKKA	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
95	JEMBATAN BETON (KANAL) GG MANDIRI	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 20 M ²	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
96	PEMBUATAN DRAINASE PASAR INDUK	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1KM M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
97	PENINGKATAN JALAN PASAR INDUK (BETONISASI)	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
98	PENINGKATAN JALAN KOLAM DESA	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
99	Rehab Gang Ulin Menjadi Semenisasi	Desa Malinau Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	125m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
100	Pengerasan Jalan Pengadilan / Pembersihan	Desa Malinau Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
101	Penimbunan Gang Nila	Desa Malinau Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
102	Peningkatan Jalan Mess	Desa Malinau Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	150m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
103	Pengaspalan Jl. Sei Binangor s/d SD	Desa Batu Lidung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
104	Pembuatan Jl. Tani	Desa Batu Lidung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1.000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
105	Pembangunan Jembatan Beton Sei Jambu	Desa Batu Lidung	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
106	Pengaspalan jalan Poros Batu Lidung-tg. Kranjang	Desa Batu Lidung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
107	Perencanaan pembangunan jembatan permanen Desa Sembuak Warod	Sembuak Warod	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Ded	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
108	Pembangunan Jalan Tani Tajan	Sembuak Warod	Panjang Jalan yang dibangun	5 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
109	Jalan Tani Pa Betung	Luso	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
110	Peningkatan Jalan kepasar Imbaya	Malinau Seberang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
111	Peningkatan Jalan tani Desa Kaliamok/Belayan	Kaliamok	Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
112	Perencanaan pembangunan jembatan permanen Desa Sembuak Warod	Sembuak Warod	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Ded	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
113	Pembuatan Jembatan Sungai Sebalu 2	Luso	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
114	Pengaspalan jalan dalam desa semengaris (Hotmick)	Semengaris	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
115	Pengaspalan Jalan dalam Desa Kelapis	Kelapis	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
116	Pengaspalan Jalan Kuburan	Belayan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
117	Pengaspalan jalan kantor camat Malinau Utara Timur	Putat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
118	Penngaspalan Jalan Dalam Desa	Putat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
119	Peningkatan Jalan ke Tane Olen	Setulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
120	Peningkatan Jalan Menuju simpang jalan Setarap	Setulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
121	Pengaspalan Jalan	Setulang - Pn Setarap	Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
122	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Batu Kajang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2800 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
123	Lanjutan Pembangunan Jalan	Sempayang - Batu Kajang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
124	Pembangunan Jembatan Gantung sungai Setulang	Tane Olen	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

125	Pemeliharaan Jembatan Gantung	Puskesmas Setulang	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
126	Pembangunan Jembatan Gantung dari Desa Setarap Ke Desa Pn. Setarap	Setarap	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
127	Pembangunan Jembatan Gantung	Setarap - Punan Setarap	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
128	Jembatan Beton	Punan Setarap	Panjang Jembatan yang dibangun	30 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
129	Pembangunan Jembatan Rangka Baja	Batu Kajang	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
130	Peningkatan Jalan menuju Jembatan Gantung	Batu Kajang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	8000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
131	Pembangunan Jembatan 2 Unit Rangka Baja (PJU)	Punan Gong Solok	Panjang Jembatan yang dibangun	2 Unit (4x40 m)	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
132	Peningkatan Jalan menuju Jembatan Gantung	Batu Kajang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	8000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
133	Pembangunan Jembatan 2 Unit Rangka Baja (PJU)	Punan Gong Solok	Panjang Jembatan yang dibangun	2 Unit (4x40 m)	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
134	Peningkatan Jalan dan Pengaspalan Jalan Dalam Desa	Punan Gong Solok	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
135	Semenisasi Jalan Desa	Gong Solok	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2.600 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
136	Peningkatan Jalan Tani	Sungai Malinau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1.000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
137	Peningkatan Jalan Masuk Desa, Jembatan dan Gorong-gorong	Long Adiu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
138	Pengaspalan Jalan dalam Desa	Punan Adiu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	800 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
139	Pembangunan Jalan Penghubung Ke Kecamatan	Lg Kebinu	Panjang Jalan yang dibangun	15.000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
140	Peningkatan Badan Jalan Malinau - Semamu	Lg. Semamu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	109 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
141	Pembukaan Jalan Lg Fala- Lg. Kebinu	Lg Fala	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
142	Peningkatan Badan Jalan dan Jembatan Lg. Simau - Malinau	Lg Simau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
143	Pembangunan Jembatan Beton Sungai Kerayan	Lg Semamu	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
144	Pembangunan Lanjutan Jembatan Melasu	Lg Semamu	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
145	Pembangunan Jembatan Apah (sungai Kerayan)	Lg Sulit	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
146	Jembatan Gantung Sungai Kinaye	Lg Fala	Panjang Jembatan yang dibangun	150 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
147	Peningkatan Badan Jalan dan Jembatan Lg. Simau - Malinau	Lg Simau	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
148	Rehab Jembatan Gantung	RT 2 Lg. Barang	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
149	Pembangunan Jembatan Gantung Sungai Segiron	RT 2 Lg. Barang	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
150	Pembukaan Badan Jalan Lg Barang-Nansarang-Bang Biau-Lg Fala	Mentarang Hulu	Panjang Jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
151	Peningkatan Badan Jalan Simpang KM 20 Malinau-Ig Barang	Mentarang Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	60 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
152	Peningkatan Jalan Menuju Kantor Camat Malinau Selatan Hilir dan Pembuatan Siring Jalan Menuju Kantor Camat	Malinau Selatan Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
153	Peningkatan Badan Jalan dari RT 1 - SMA 11 Malinau	Lg Barang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
154	Perbaikan Jalan RT 2 dari Ujung Aspal ke Sungai Barang	RT 2 Lg. Barang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
155	Pengaspalan Jalan RT 1 dan RT 2 Lung barang	RT 1 dan RT 2 Lg. Barang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
156	Pembukaan Akses Jalan Darat ke Kecamatan	Lg Mekatip	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

157	Peningkatan Jalan dalam Desa	Lg Mekatip	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 x 800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
158	Pengaspalan Jalan baru Desa Long Temuyat	Desa Long Temuyat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
159	Pengaspalan Jalan baru Desa Long Temuyat	Desa Long Temuyat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
160	Pembangunan jembatan rangka baja muara Nawang	Desa Long Nawang	Panjang Jembatan yang dibangun	150 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
161	Pembangunan Jembatan Rangka Baja	Desa Nawang Baru	Panjang Jembatan yang dibangun	75 x 4 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
162	Pembangunan Jembatan rangka Pipa Baja Desa Long Payau	Desa Long Payau	Panjang Jembatan yang dibangun	8 x 25 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
163	Peningkatan Lanjutan ageregat jalan dari simpang jalan poros ke Desa Long Payau	Desa Long Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3,5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
164	Pembangunan Lanjutan Jalan Usaha Tani Sungai Batu Kawit	Desa Long Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
165	Pembangunan Jalan Tani menuju Poktan Lepotan Sungai Peliau	Desa Long Betaoh	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 x 8 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
166	Pengaspalan Jalan dari simpang poros perbatasan menuju Desa Long Betaoh	Desa Long Betaoh	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
167	Peningkatan Jalan Usaha Tani Sungai Laleng	Desa Nawang Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
168	Pembangunan Jalan Objek Wisata Lubang Uwai	Desa Long Temuyat	Panjang Jalan yang ditingkatkan	33 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
169	Semenisasi Jalan di Lingkungan Kantor Kecamatan Malinau Selatan	Kec.Mal-sel	Panjang Jalan yang dibangun	1 Kegiatan	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
170	Pembangunan Jalan Aspal dalam Desa	Desa Punan Rian	Panjang Jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
171	Pembangunan Jembatan Sungai Benuang Kontruksi Besi Beton	Desa Long Loreh	Panjang Jembatan yang dibangun	2 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
172	Pembangunan jembatan sungai Samuda Betuen Kontruksi Beton	Desa Long Loreh RT 06	Panjang Jembatan yang dibangun	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
173	Aspal Jalan Lingkungan Desa	Desa Laban Nyarit	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
174	Pengaspalan Jalan Poros Desa Langap	Desa Langap RT 01-06	Panjang Jalan yang ditingkatkan	600 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
175	Pembangunan Aspal hotmix jalan dari Kabupaten Malinau ke Mal-Sel	Desa Long Loreh	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
176	Peningkatan Jalan simpang 3 menuju POLSEK	Desa Long Loreh	Panjang Jalan yang ditingkatkan	200 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
177	Pengaspalan Jalan Pulau Sapi Seberang - Singai Terang	Pulau Sapi Seberang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 x 3.000 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
178	Pengaspalan Jalan Desa	Harapan Maju	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
179	Pembukaan Jalan Antara Sungai Mentarang Tubu Kelokasi Semamu	Mentarang Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	59 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
180	Pembangunan Jembatan Rangka Baja antara Desa Paking dan Harapan Maju	Harapan Maju	Panjang Jembatan yang dibangun	30 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
181	Pembangunan Jembatan Rangka baja Paking Lama Kepaking Seberang	Harapan Maju	Panjang Jembatan yang dibangun	170 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
182	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sungai Melotok Dan Sungai Bou	Paking	Panjang Jembatan yang dibangun	60 Mtr	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
183	Pembangunan Jembatan Besi	Temalang Hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
184	Pembangunan Jembatan gantung	Temalang Hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	2 x 50 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
185	Pembangunan Jembatan Besi Sungai Turan mentarang hulu	Mentarang hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	50 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
186	Pembangunan Jembatan Rangka Baja	Paking	Panjang Jembatan yang dibangun	200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
187	Pembangunan Jembatan Besi Sungai Turan mentarang hulu	Mentarang hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	50 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
188	Pembangunan Jembatan Gantung	Mentarang Hulu	Panjang Jembatan yang dibangun	2 x 50 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

189	Pembangunan Jembatan Rangka Baja antara Desa Paking dan Harapan Maju	Harapan Maju	Panjang Jembatan yang dibangun	30 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
190	Pembangunan Jembatan Rangka baja Paking Lama Kepaking Seberang	Harapan Maju	Panjang Jembatan yang dibangun	170 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
191	Perbaikan Jalan Long Berang ke Temalang	Temalang Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
192	Penngaspalan Jalan Dalam Desa	Paking	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2.000 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
193	Perawatan Jalan Rajuk - Paking dan Rajuk Malinau	Paking	Panjang Jalan yang ditingkatkan	28 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
194	Pengaspalan Jalan tani Gunung Tajan	Sungai Binci	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5.000 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
195	Pembukaan Jalan Tani Singgaraang	Lidung Keminci	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3.000 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
196	Pemeliharaan Badan Jalan Dilokasi Baru	Long Bisai Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	10 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
197	Peningkatan Jalan Pertanian (Agregat B)	Jalan Tani Kemakmuran	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
198	Pengaspalan Jalan Pulau Sapi Seberang - Singai Terang	Pulau Sapi Seberang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
199	Perbaikan Jalan Long Berang ke Temalang	Mentarang Hulu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
200	Pengaspalan Jalan Poros Tani Desa Mentarang baru	Mentarang Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	8 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
201	Pemeliharaan Badan Jalan Dilokasi Baru	Long Bisai Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
202	Pengaspalan Jalan Desa	Harapan Maju	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1800 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
203	Penngaspalan Jalan Dalam Desa	Paking	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2.000 Mtr	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
204	Perawatan Jalan Rajuk - Paking dan Rajuk Malinau	Paking	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
205	Peningkatan jalan antar desa long aran dengan desa pujungan	Desa Long Aran	Panjang Jalan yang ditingkatkan	20 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
206	Pelebaran jalan dan pengaspalan jalan dalam desa	desa long ketaman	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 x 600 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
207	Pengaspalan jalan PU Pujungan -Ketaman	desa long ketaman	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
208	Pembangunan Jembatan Gatung	Desa Long Lame	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
209	Pembangunan jembatan gantung (sungai pujungan)	desa Long Pua	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
210	Pembangunan jembatan kerangka Baja s. jelet	desa long jelet	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
211	Pembangunan jembatan s. bahu	desa long paliran	Panjang Jembatan yang dibangun	120 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
212	Pembangunan Jembatan gantung	desa long belaka	Panjang Jembatan yang dibangun	2X80m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
213	Jembatan gantung (long meraje)	long Bena	Panjang Jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
214	Pembangunan jalan darat long pua dan ketaman	desa Long Pua	Panjang Jalan yang dibangun	150 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
215	Peningkatan jalan long jelet- pujungan	desa long jelet	Panjang Jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
216	Pembukaan badan jalan PU Bena-pujungan	long Bena	Panjang Jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
217	Jalan Tani Menuju Sungai Pila	Long Lebusan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
218	Pembanguna Jalan Baru Dalam Desa Data Baru	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
219	Peningkatan Jalan dalam Desa Data Baru menuju Batang Lataq	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2,5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
220	Peningkatan Jalan Data Baru menuju Jembatan Lebusan	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3,8 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

221	Pembukaan Jalan ke Air Terjun Sungai Aruq	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
222	Pembukaan Jalan Pertanian (Sapan)	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
223	Peningkatan JaLan Pertanian (Sungai)	Data Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	2 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
224	Pengerasan Jalan dari lebusan ke Long Top	Long Top	Panjang Jalan yang ditingkatkan	38 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
225	Penambahan Aspal Jalan Menuju Bandara	Mahak Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1500 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
226	Bangun Baru Jembatan Sungai Lebusan	Long Lebusan	Panjang Jembatan yang dibangun	80 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
227	Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sungai Aruq (Batang Lataq)	Data Baru	Panjang Jembatan yang dibangun	10 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
228	Pembuatan Jembatan Sungai Sapan	Long Top	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
229	Pembuatan jembatan Sapan Ugap	Long Top	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
230	Pembuatan Jembatan Rangka Baja sungai Uhuq	Long Top	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
231	Perawatan Jembatan Besi	Mahak Baru	Panjang Jembatan yang dibangun	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
232	Pembangunan Jembatan rangka baja Sungai Boh	Agung Baru	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
233	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sungai Bulok	Mahak Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 m x 5000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
234	Pembukaan Jalan Menuju Lokasi Pembuangan Sampah	Mahak Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
235	Pembukaan Jalan Usaha Tani Sungai Wei	Mahak Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	7 m x 5000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
236	Pembukaan Jalan Usaha Tani Lalut Anit	Mahak Baru	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
237	Semenisasi Jalan Dalam Desa(700 x 2,5 m)	Rian Tubu	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
238	Pembuatan jalan dari Kecamatan ke Desa Rian Tubu	Rian Tubu	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
239	Pembuatan Jembatan Gantung	Rian Tubu	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
240	Pembukaan Jalan Long Pada - Long Ranau	Long Ranau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
241	Semenisasi Jalan Dalam Desa 1500 m	Long Titi	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
242	Peningkatan Kualitas Jalan dan Pengaspalan Jalan dalam desa	Long Ampung - Metulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	4 Km x 8 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
243	Pembukaan Badan Jalan Pemukiman desa Long Ampung	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
244	Pembangunan JalanTani Sungai Ire	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	7 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
245	Pengerasan dan Pengaspalan Jalan menuju Gereja GKII Long Ampung	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	400 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
246	Semenisasi jalan SMP 1 Kayan Selatan	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	P=28 m x 2 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
247	Semenisasi halaman sekolah SDN 001 Kayan Selatan	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	270 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
248	Pembukaan Jalan Pengembangan Desa Menggunakan Alat Berat	Metulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
249	Pembukaan Jalan Usaha Tani Apau Suaq	Metulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
250	Pembukaan Badan Jalan apau Dadoq	Metulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
251	Pengerasan dan Pengaspalan Jalan menuju Gereja Katolik Long Ampung	Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	100 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
252	Pembangunan Peningkatan Jalan dari Poros ke Desa Long Uro	Long Uro	Panjang Jalan yang ditingkatkan	-	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

253	Pembangunan Jalan Long Uro - Long Ampung	Long Uro - Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
254	Pembangunan Jalan Tani Sungai Payau	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
255	Pembangunan Jalan Menuju Kecamatan & Bandara	Lidung Payau - Long Ampung	Panjang Jalan yang ditingkatkan	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
256	Pengikatan/ Pengaspalan Jalan dalam Desa	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
257	Pengerasan Jalan antar Lidung Payau -Long Uro	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
258	Aspal Jalan usaha Tani Apau Tukung	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
259	Pembangunan Jalan Lidung Payau -Long Ampung	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
260	Pemeliharaan Badan Jalan dari Tower ke Desa	Long Uro	Panjang Jalan yang ditingkatkan	3 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
261	Peningkatan Jalan Kelompok Tani	Sungai Barang	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
262	Pembukaan Badan Jalan Apau Dadoq	Metulang	Panjang Jalan yang ditingkatkan	6 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
263	Rehap Total Jalan usaha Tani jika Kabuk	Lidung Payau	Panjang Jalan yang ditingkatkan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
264	Pembangunan Jembatan kerangka Pipa Baja Belau Saleng	Metulang	Panjang Jembatan yang dibangun	40 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
265	Pembangunan Jembatan kerangka Pipa Baja Long Metisai	Metulang	Panjang Jembatan yang dibangun	40 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
266	Pembangunan JembatanGantung Sungai KayanPipa Baja	Long Uro	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
267	Pmbangunan Jembatan menuju lapangan Maf	Sungai Barang	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
268	Pemeliharaan Jembatan Rangka Pipa Baja Sungai Kayan	Long Ampung	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
269	Pemeliharaan Jembatan Rangka Pipa Baja Sungai Bawang	Long Ampung	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
270	Pemeliharaan Jembatan Rangka Pipa Baja Sungai Anai	Long Ampung	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
271	Pembangunan perawatan jalan ke bendungan PLMTH	Long Uro	Panjang Jembatan yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
272	Peningkatan jalan dan jembatan penghubung kec.kayan hilir-Kec.kayan hulu	Kayan Hilir	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
273	Perbaikan jalan KM 76 muara wahau menuju desa sule	Sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
274	Semenisasi jalan menuju rumah dinas	Sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
275	Aspal Jalan Di lokasi baru	Data Dian	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
276	Pemeliharaan Jalan PU	Long metun	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
277	Pengerasan Jalan Dalam Desa	Sai Anai	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
278	Semenisasi jalan dalam desa	Sai Anai	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
279	Semenisasi jalan desa	Long sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
280	Pembangunan Jalan tani	Long sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
281	Pembangunan jalan long top-long Sule	Long sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
282	Semenisasi jalan menuju Bandara	Long sule	Panjang Jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
283	Pembangunan Jembatan sungai metun	Long metun	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
284	Pembangunan Jembatan Beton sungai metun	Sai Anai	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

285	Pembangunan jembatan Sungai Kayan iut kontruksi beton	Long Pipa	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
286	Rehap jembatan gantung sungai sule dan kayan iut	Long Pipa	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
287	Rehap jembatan gantung sungai long pipa	Long Pipa	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
288	Pembangunan Jembatan Rangka Baja sungai Kayan	Long Sule	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
289	Pembangunan Jembatan rangka baja sungai sule	Long sule	Panjang Jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
290	Pembangunan Penyedia Air Bersih Sungai Melua	Long Alango	Presentase jaringan PDAM yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
291	Pembangunan Sarana Air Bersih	Metut (Kecamatan)	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
292	Jaringan air bersih	Desa Pelita Kanaan	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kabiran	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
293	Pemasangan /Jaringan Air Bersih Menuju Gereja GPSDI	Respen Tubu	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
294	Air Bersih (Pamsimas)	Kantor Camat Masehi	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
295	Pemasangan jaringan air bersih Desa Setulang	Setulang	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
296	Pembangunan Sarana Air Bersih (PAM)	Setarap	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
297	Rehab Pembangunan sarana Air Bersih	Punan Setarap	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
298	Rehabilitasi DAM Air Bersih	Batu Kajang	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
299	Pembangunan Air Bersih	Punan Adiu	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	6000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
300	Pengadaan Air Bersih di SMAN 11 Malinau	Lg Barang	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
301	Pengadaan Pipa PAM	RT 2 Lg. Barang	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	300 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
302	Peningkatan DAM air Bersih Masyarakat	Lg Mekatip	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
303	Renovasi Jaringan Air Bersih	Desa Pelancau	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
304	Pembangunan DAM air Bersih	Desa Long Aran	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
305	Pembangunan Dam air bersih	Desa Long Lame	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
306	Air Bersih Kantor Kecamatan dan Puskesmas Sungai Tubu	Kecamatan	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
307	Pembangunan Sumber Air Bersih	Long Titi	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
308	Pengadaan dan Pemasangan air bersih Pamsimas Desa	Long Sule	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
309	Pembangunan jaringan air bersih	Long sule	Jumlah sambungan jaringan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
310	Pembangunan Drainase Pembuangan Air PLTMH	Long Alango	Panjang Drainase yang di Bangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
311	Perbaikan Drainase Jl. Raja Pandita	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
312	Drainase belakang rumah pak Tahir	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
313	Drainase sungai batu Lemampu	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
314	Normalisasi drainase	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Normalisasi		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
315	Pembuatan drainase Jl.Masjid Darull Fallah	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
316	Perbaikan parit Jl.Padat karya (Jl.Tani)	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

317	Pembuatan Drainase Jl.poros RT.04	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
318	Pemeliharaan drainase jalan	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di pelihara		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
319	Rehab drainase Jl.Raja Pandita	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di rehab		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
320	Perbaikan drainase jl.Raja Pandita	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di rehab		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
321	Rehab/perbaikan drainase Jl.Raja Pandita	Desa Malinau Hulu	Panjang Drainase yang di rehab		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
323	Rehab drainase lingkungan Desa	Desa Pelita Kanaan	Panjang Drainase yang di rehab		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
324	DRAINASE (JALAN LAMA)	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	1800 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
325	PEMBUATAN DRAINASE	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
326	NORMALISASI PARET IRIGASI /DRAINASE ANTARA RT 9 DAN RT 10	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di normalisasi	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
327	DRAINASE	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	200 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
328	DRAINASE SAMPING GEREJA	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	1000 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
329	DRAINASE SAMPING RUMAH PAK JAMAL	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	± 300 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
330	PEMBUATAN DRAINASE PASAR INDUK	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	1KM M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
331	PEMBUATAN DRAINASE SEPANJANG JALAN AMD	Desa Malinau Kota	Panjang Drainase yang di Bangun	1 KG M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
332	Pembuatan Drainase Jalan Usat Laing	Desa Tanjung Keranjang	Panjang Drainase yang di Bangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
333	Drainase	Desa Pelita Kanaan	Panjang Drainase yang di Bangun	300 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
334	Drainase	Lg Fala	Panjang Drainase yang di Bangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
335	Sanitasi Pembuangan Limbah	Lg Fala	Jumlah layanan pengolahan air limbah domestik	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
336	Pembangunan Drainase dalam Desa	Lg Mekatip	Panjang Drainase yang di rehab	200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
337	Rehab Drainase jalan Poros Desa Langap	Desa Langap RT 01-06	Panjang Drainase yang di rehab	10x16 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
338	Pembangunan Drainase Lingkungan RT 04,06,07 & 08	Desa Long Loreh	Panjang Drainase yang di rehab	4 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
339	Pembangunan Drainase jalan RT 06 Liumahan	Desa Long Loreh RT 06	Panjang Drainase yang di rehab	1000 Mtr	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
340	Pembangunan Drainase Keliling Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Panjang Drainase yang di rehab	1 x 150 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
341	Pembangunan Drainase	Long sule	Panjang Drainase yang di rehab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
342	Bantuan Rumah Sosial	Long Kemuat	Jumlah rumah layak huni	10 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
343	BEDAH RUMAH	Desa Malinau Kota	Jumlah rumah layak huni	5 Unit	Diakomodir dalam Renja DPUPR-PERKIM	Musrenbang
344	Bedah Rumah	Desa Batu Lidung	Jumlah rumah layak huni	3 Rumah	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
345	Bedah Rumah	Desa Malinau Kota	Jumlah rumah layak huni	5 KK	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
346	Rehab Rumah Warga Miskin	Desa Malinau Kota	Jumlah rumah layak huni	1 KEGIATAN	Diakomodir dalam Renja DPUPR-PERKIM	Musrenbang
347	Pembangunan Rumah Warga	Respen Tubu	Jumlah rumah layak huni	70 Unit	Diakomodir dalam Renja DPUPR-PERKIM	Musrenbang
348	Pembangunan Rumah Warga	Malinau Seberang	Jumlah rumah layak huni	50 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
349	Pembangunan Rumah Singgah mess Lg. Simau - Malinau	Lg Simau	Jumlah rumah layak huni	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
350	Penggusuran lahan baru untuk pemukiman penduduk dan perumahan ASN	Kec. Kayan Hulu	Jumlah rumah layak huni	1. Ha	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
351	Rumah layak Huni Masyarakat	Desa Laban Nyarit	Jumlah rumah layak huni	20 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

352	Pembangunan Rumah Sosial Desa Metulang	Metulang	Jumlah rumah layak huni	6x 6 M (33Unit)	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
353	Pembangunan Pasar Desa	Long Uro	Jumlah rumah layak huni	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
354	Pembangunan pasar desa	Sule	Jumlah rumah layak huni	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
355	Pembangunan rumah layak huni	Long sule	Jumlah rumah layak huni	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
356	Rehab rumah warga	Long sule	Jumlah rumah layak huni	30 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
357	Rehab Berat Kantor Camat Bahau Hulu	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
358	Rehab Berat Rumah Dinas Camat	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
359	Pembangunan Rumah Dinas Staf Couple	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	2 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
360	Landscape Halaman Kantor Camat Bahau Hulu	Kec. Bahau Hulu		1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
361	Rehab Berat Kantor Camat Bahau Hulu	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
362	Pembangunan Rumah Dinas Sekcam	Kec. Bahau Hulu	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
363	Rehab Asrama Long Uli	RT. 3 Pujungan	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
364	Pembangunan Gedung Kantor BPD	Long Kemuat	Jumlah bangunan yang dibangun	10 X 14 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
365	Bantuan Rumah Sosial	Long Kemuat	Presentase pembangunan gedung	10 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
366	Pembangunan Kopel Kantor Camat Malinau selatan Hulu	Metut (Kecamatan)	Jumlah bangunan yang dibangun	3 Kopel	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
368	REHAB SEMENISASI	Desa Malinau Kota		150 METER	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
369	PEMBUATAN MENARA MASJID RT 13	Desa Malinau Kota	Presentase pembangunan gedung	1 KEGIATAN	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
370	SEMENISASI GANG ERWIN	Desa Malinau Kota		± 200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
371	PEMBANGUNAN GEREJA GESBA	Desa Malinau Kota	Presentase pembangunan gedung	1 KEGIATAN	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
372	PENINGKATAN JALAN KOLAM DESA	Desa Malinau Kota	Panjang Jalan yang ditingkatkan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
373	Pembangunan Kantor Desa	Gong Solok	Presentase pembangunan gedung	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
374	Semenisasi Jalan Desa	Gong Solok		2.600 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
375	Pembangunan Kantor Desa	Long Adiu	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
376	Pembangunan Kantor Desa	Punan Adiu	Jumlah bangunan yang dibangun	10 x 20	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
377	Rehab PUSTU	Lg Fala	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
378	Rehab GOR Badminton	Lg Barang	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
379	Peningkatan Badan Jalan Simpang KM 20 Malinau-Ig Barang	Mentarang Hulu	Panjang jalan yang ditingkatkan	60 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
380	Peningkatan Badan Jalan dari RT 1 - SMA 11 Malinau	Lg Barang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
381	Pelebaran Lapangan Upacara SMAN 11 Malinau	Lg Barang	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
382	Rehab Jembatan Gantung	RT 2 Lg. Barang	Panjang jembatan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
383	Ronovasi Rumah Dinas Camat	Lg. Barang	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang
384	Rehab Rumah Dinas Guru SDN 001 Mentarang Hulu	Lg. Barang	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrenbang

385	Rehab Kantor Camat Kayan Hulu	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
386	Rehab Total rumah dinas Eselon Kantor Camat Kayan Hulu	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	2 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
387	Pembangunan landscape halaman Apel Kantor Camat Kayan Hulu	Kec. Kayan Hulu	Presentase pembangunan gedung	1.318 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
388	Pembangunan Kantor Polsek	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
389	Pembangunan kantor Koramil	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
390	Pembangunan UPTD Dinas PU	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
391	Semenisasi/cor beton dari simpang tunggu perjuangan sampai kantor dan rumah Dinas Camat	Kec. Kayan Hulu		5x130 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
392	Rehab Gedung Olahraga Kecamatan Kayan Hulu	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
393	Pembangunan stadion Long Nawang	Desa Long Nawang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Ha	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
394	Pembangunan Gedung Gereja GKII Desa Long Payau yang permanen	Desa Long Payau	Jumlah bangunan yang dibangun	12 x 25 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
395	Pembangunan Balai Adat Badeng	Desa Long Betaoh	Jumlah bangunan yang dibangun	20 m x 40	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
396	Pembangunan Pagar Gereja GPIB	Desa Long Betaoh	Jumlah bangunan yang dibangun	50 x 40 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
397	Pembangunan Gedung Sekolah Dasar (Permanen)	Desa Long Betaoh	Jumlah bangunan yang dibangun	3 lokal	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
398	Pembangunan Gedung Gereja GPIB	Desa Nawang Baru	Jumlah bangunan yang dibangun	20x35 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
399	Pembangunan Pastori GKII Nawang Baru	Desa Nawang Baru	Jumlah bangunan yang dibangun	20x35 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
400	Pembangunan Rumah Dinas Pustu Desa Long Payau	Desa Long Payau	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
401	Rehab Pustu Desa Long Payau	Desa Long Payau	Jumlah bangunan yang direhab	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
402	Pembangunan Kantor Desa Nawang Baru	Nawang Baru	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
403	Pembangunan Kantor Desa (beton)	Long Temuyat	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
404	Pembangunan Kantor Desa (beton)	Long Betaoh	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
405	Rehab Rumah Dinas Camat dan Mess Pegawai Kecamatan	Kec.Mal-sel	Jumlah bangunan yang direhab	1 Kegiatan	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
406	Pembangunan Kantor Desa	Desa Pelancau	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
407	Pembangunan Gedung Badminton	Desa Long Loreh	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
408	Pembangunan BPU	Tulid Fasan	Jumlah bangunan yang dibangun	8x24 Mtr	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
409	Pembangunan Gedung Serba Guna	Sungai Binci	Jumlah bangunan yang dibangun	15 x 30 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
410	Pembangunan Balai Desa Data Baru	Data Baru	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
411	Landscape Halaman Kantor Camat Sungai Boh	Mahak Baru	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
412	Rumah Camat Sungai Tubu dan ASN Kecamatan.	Kecamatan	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
413	Penataan Kantor Camat (Semenisasi Halaman Kantor Camat,Pagar Keliling.	Kecamatan	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
414	Rehab Berat Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang direhab	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
415	Rehab Berat Rumah Dinas Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang direhab	3 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang
416	Pembangunan Land Scape Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musrembang

417	Pembangunan Rumah Dinas ASN Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	4 Unit , 6 x 9 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
418	Pembangunan Mes Kecamatan Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	12 x 21 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
419	Pembangunan Pagar keliling Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	90 x 150 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
420	Pematangan Lahan untuk Perumahan Dinas ASN Kantor Camat Kayan Selatan	Long Ampung		300 x 300 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
421	Pembangunan Kantor BPD Long Ampung	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	6 x 9 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
422	Pembangunan Kantor PKK Long Ampung	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	8 x 12 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
423	Pembangunan Kantor Desa Long Ampung	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	12 x 14 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
424	Pembangunan Pagar keliling Sekolah Paud	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
425	RKB (Ruang Kelas baru dan Mes Guru) SMPN 01 Long Ampung	Long Ampung	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
426	Pembangunan Rumah Sosial Desa Metulang	Metulang	Jumlah rumah layak huni yang dibangun	6x 6 M (33Unit)	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
427	Pembangunan Rumah Ibadah Long Uro	Long Uro	Jumlah bangunan yang dibangun	30 x 16 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
428	Pembangunan Kantor Desa Long Uro	Long Uro	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
429	Pembanguna Gedung Paud	Long Uro	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
430	Pembangunan Gedung GKII	Sungai Barang	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
431	Pembangunan Siring Lokasi Gereja GKII dan Katholik	Long Ampung	Presentase pembangunan gedung		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
432	Pembangunan Siring SDN 002 Kayan Selatan	Long Uro	Presentase pembangunan gedung	10 x 100 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
433	Pembangunan Siring Lapangan Sepak Bola	Long Uro	Presentase pembangunan gedung		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
434	Pembangunan Pasar Desa	Long Uro	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
435	Pembangunan Kantor Desa Permanen	Desa Data Dian	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
436	Pembangunan Kantor Desa Permanen	Sai Anai	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
437	Rehap Kantor Perwakilan	Long Pipa	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
438	Pembangunan Rumah Dinas Kecamatan	Data Dian	Jumlah bangunan yang dibangun	5 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
439	Rehap Aula Kantor Camat Kayan Hilir	Data Dian	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
440	Pembangunan pasar desa	Sule	Jumlah bangunan yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
441	Semenisasi jalan menuju rumah dinas	Sule	Panjang Jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
442	Pembangunan Tribun Lapangan Sepak Bola	Data Dian	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
443	Pembangunan Rumah singgah Kapolsubsektor	Data Dian	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
444	Pembangunan Balai Adat	Data Dian	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
445	Pembangunan BPU long metun	Long metun	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
446	Pembangunan Kantor Desa	Long Metun	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
447	Pembangunan Gedung Gereja Permanen	Long metun	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
448	Pembangunan Gedung GKII	Long Pipa	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang

449	Pembangunan Kantor PKK	Long Pipa	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
450	Pembangunan Kantor RT	Long Pipa	Jumlah bangunan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
451	Siring Jalan Sungai Bengalun	Desa Malinau Hilir	Panjang normalisasi yang dilakukan	100m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
452	Penyiringan tepian Sungai Bengalun	Desa Tanjung Keranjang	Jumlah bangunan siring yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
453	Kelanjutan siring batu lempu	Desa Malinau Hulu	Jumlah bangunan siring yang dibangun	400	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
454	Pembuatan Turab sungai sesayap kuala kabiran	Desa Malinau Hulu	Jumlah bangunan siring yang dibangun	500	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
455	Siring sungai sesayap	Desa Pelita Kanaan	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
456	Normalisasi Sugai Gang Sebamban	Desa Malinau Kota	Panjang normalisasi yang dilakukan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
457	SIRING PARIT WARGA SWADAYA (BELAKANG RUMAH PAK WEMPI)	Desa Malinau Kota	Jumlah bangunan siring yang dibangun	± 200 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
458	NORMALISASI SUNGAI AJI MARWAN (SUNGAI AJI MARWAN)	Desa Malinau Kota	Panjang normalisasi yang dilakukan	± 500 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
459	NORMALISASI KANAL	Desa Malinau Kota	Panjang normalisasi yang dilakukan	± 5 KM	Diakomodir dalam Renja DPUPR-PERKIM	Musreimbang
460	Siring Jalan Sungai Bengalun	Desa Malinau Hilir	Panjang normalisasi yang dilakukan	200m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
461	Siring Sungai Bengalun	Desa Batu Lidung	Jumlah bangunan siring yang dibangun	500 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
462	Normalisasi Sungai Kaliamok (Mengkuem)	Kaliamok	Panjang normalisasi yang dilakukan	2 KM	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
463	Pembangunan Embung	Putat	Jumlah pemnangunan embung yang dilakukan	1 Lokal	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
464	Penyiringan & Penimbunan Jalan Dermaga	Lubak Manis	Jumlah bangunan siring yang dibangun	120 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
465	Pembangunan Siring pinggir sungai Semendurut Daerah pemukiman penduduk lapangan sepak bola dan area gedung sekolah SDN 007 (EROSI)	Salap	Jumlah bangunan siring yang dibangun	700 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
466	Bendungan Irigasi Sungai Lung Fala dan Ketutut	Lg Fala	Panjang Irigasi yang dibangun	54 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
467	Pembangunan Siring Sungai Kinayah Negabor	Lg Fala	Jumlah bangunan siring yang dibangun	100 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
468	Bendungan Irigasi Sungai Lung Fala dan Ketutut	Lg Fala	Panjang Irigasi yang dibangun	54 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
469	Pembangunan Siring Sungai Kinayah Negabor	Lg Fala	Jumlah bangunan siring yang dibangun	100 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
470	Pembangunan Siring Sungai Kinayah	Lg Mekatip	Jumlah bangunan siring yang dibangun	700 M	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
471	Pembangunan siring/Bronjongan jembatan Baja Long Nawang	Kec. Kayan Hulu	Jumlah bangunan siring yang dibangun	7 x 30 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
472	Pembangunan Siring dan Penahan Longsor Disepanjang Tepian Sungai	Lidung Keminci	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1.000 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
473	Pembangunan Siring Sepanjang Pinggir Sungai RT 01 dan RT 02	Lokasi Singai Terang	Jumlah bangunan siring yang dibangun	700 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
474	Pembangunan Kanal/ siring RT 03	Long Bisai Baru	Jumlah bangunan siring yang dibangun	400 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
475	Pembangunan Siring Sei. Lubang Buaya	Long Gafid	Jumlah bangunan siring yang dibangun	400 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
476	Normalisasi Arur Kilu-kilu	Pulau Sapi	Panjang sungai yang dinormalisasi	2500 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
477	Pembangunan Siring dan Penahan Longsor Disepanjang Tepian Sungai	Lidung Keminci	Jumlah bangunan siring yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
478	Pembuatan sering beton pinggir sungai pujungan	desa long punjungan	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
479	Pengerukan dan Pembuatan siring	Dumu Mahak	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1 Kegiatan	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
480	Pembuatan Irigas Sawah	Long Nyau	Panjang Irigasi yang dibangun	1 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
481	Pembangunan Irigasi Persawahan	Long Titi	Panjang Irigasi yang dibangun	1	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang

482	Pembangunan Siring Desa	Long Pada	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
483	Pembangunan Siring Lokasi Gereja GKII dan Katholik	Long Ampung	Jumlah bangunan siring yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
484	Pembangunan Siring Sungai Kayan RT. 2 Long Ampung	Long Ampung	Jumlah bangunan siring yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
485	Pembangunan Siring SDN 002 Kayan Selatan	Long Uro	Jumlah bangunan siring yang dibangun	10 x 100 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
486	Pembangunan Siring Lapangan Sepak Bola	Long Uro	Jumlah bangunan siring yang dibangun		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
487	Pembangunan Siring Pinggir Sungai	Long Pipa	Jumlah bangunan siring yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
488	Pengadaan Tiang Listrik	Desa Malinau Hulu	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	4	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
489	Pengadaan Tiang Listrik Jl Sungai Bengalun	Desa Malinau Hilir	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	3 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
490	Pembangunan PLTS	Long Jalan	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
491	Pembangunan PLTS	Mirau	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
492	Pembangunan PLTS	Long Lake	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
493	Pembangunan PLTS	Long Rat	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
494	Pembangunan PLTS	Nahakramo	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
495	Pembangunan Jaringan PLN	Tj. Nanga	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
496	Pembangunan Jaringan PLN	Halanga	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
497	Pemasangan Jaringan Listrik Menuju Kantor Camat	Kantor Camat Masehi	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	2 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
498	PLN	Setulang	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
499	Pengadaan Lampu 1 Kabel Dalam Desa	Punan Gong Solok	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
500	Rehab PLTA Sungai Badai	Lg. Semamu	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
501	pemeliharaan dan perbaikan PLTS	Lg Simau	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	2 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
502	Penyirangan Sekitar Lokasi TPU/Kuburan	RT 2 Lg. Barang	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
503	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Sungai Tahap	Desa Long Betaoh	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	50 KWH	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
504	Pelatihan Perawatan Mesin PLTMH	Desa Long Payau	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	2 Orang	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
505	Pembangunan Jaringan Listrik	Desa Punan Rian	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
506	Pengadaan Jaringan Listrik PLN	Pulau Sapi Seberang	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	5 Km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
507	Pembangunan Listrik tenaga Komonal	Harapan Maju	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	159 KK	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
508	Pembangunan Jaringan PLN	Harapan Maju	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	159 KK	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
509	Pembangunan DAM PLTMH	desa long punjungan	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
510	Pembangunan PLTMH	Desa Long Aran	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
511	Pembangunan DAM air Bersih	Desa Long Aran	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
512	Pembangunan PLTA	desa long belaka	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
513	perbaikan Lampu PLTS	desa long belaka	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang

514	PLTMH	Long Lebusan	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
515	Pembangunan Lanjutan PLTMH Sungai Palet	Mahak Baru	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
516	PLTS Terpadu	Long Nyau	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
517	PLTS Terpadu	Rian Tubu	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
518	Pengadaan Solar Sel	Rian Tubu	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
519	Pembangunan PLTS Terpadu	Long Ranau	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
520	PLTS Terpadu	Long Titi	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
521	Pembangunan perawatan jalan ke bendungan PLMTH	Long Uro	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau		Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
522	Pengadaan PLTS dalam Desa	Sule	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
523	Pembangunan Pembangkit Listrik PLTMH	Data Dian	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
524	Peningkatan sarana PLTS	Data Dian	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
525	Pembangunan PLTMH	Long Metun	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
526	Penyelesaian PLTMH	Sai Anai	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
527	Pembangunan instalasi Listrik	Long Pipa	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
528	Pembangunan PLTMH	Long sule	Tersedianya LPJU Jarlis PLN Kab. Malinau	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
529	Perencanaan Desain Tata Ruang Pengembangan Desa	Apau Ping		1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Musreimbang
	USULAN POKIR DPRD					
1	Pembangunan air bersih sungai Bah	Long Pujungan, Kab. Malinau	Jumlah sambungan jaringan SPAM dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
2	Pembangunan DAM PLTMH	Long Pujungan, Kab. Malinau		1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
3	Pembuatan siring beton pinggir sungai pujungan	Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
4	Pengaspalan jalan menuju bandara	Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
5	Pembangunan Siring sungai Manjakan	Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
6	Pelebaran jalan rawat inap	Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
7	semenisasi jalan menuju SMAN 7	SMP 7 Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
8	pengaspalan jalan/rehabilitas jalan	Desa Long Pujungan RT.01, Kab. Malinau	Panjang jalan yang direhab	100 Meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
9	REHABILITAS SARANA OLAH RAGA	Desa Sempayang, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
10	Peningkatan jalan masuk Desa Sempayang	Desa Sempayang, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
11	Pembangunan jembatan sungai Bengalun	Desa Sempayang, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
12	Rehabilitas gedung GKII Sempayang	Desa Sempayang, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang direhab	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
13	Ruang tunggu bandara Mahak Baru Kec. Sungai Boh dalam kondisi rusak berat. bangunan ruang tunggu bandara ini merupakan bangunan lama dan tidak layak/dapat digunakan lagi. oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus segera membangun ruang tunggu bandara Mahak Baru yang representatif, aman dan nyaman bagi masyarakat	Mahak Baru, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang direhab	1 Gedung	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
14	Pembangunan Jembatan gantung di desa pada	desa long pada kecamatan sungai tubu, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD

15	Pembangunan semenisasi jalan Respen Tubu RT.6 panjang 200 Meter lebar 4 meter	Desa Respen Tubu RT. 06, Kab. Malinau	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
16	Pembangunan Semenisasi jalan desa long pada	Desa Long Pada, Kab. Malinau	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
17	Pembangunan kanal di desa respen tubu	Respen Tubu, Kab. Malinau	Panjang kanal yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
18	Pembangunan jalan tani di Sumbuk warod	Desa Sumbuk Warod, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
19	pemeliharaan jalan tani desa nawang baru.long ampung dan mahak baru	desa nawang baru,desa long ampung dan desa mahak baru, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	42000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
20	penerangan rumah penduduk	desa beta'o kec.kayan hulu, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	15000 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
21	pengaspalan jalan dari desa loreh - desa langap kec.malinau selatan	desa long loreh - desa langap kec.malinau selatan, Kab. Malinau	Panjang jalan yang direhab	18000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
22	peningkatan dan perawatan jalan tani	desa long adiu dan punan adiu, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	32000 m	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
23	pembangunan jembatan	desa bila bekayuk kec.malinau selatan, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
24	pembangunan drainase/paret jalan desa	desa langap kec.malinau selatan, Kab. Malinau	Panjang drainase yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
25	pembangunan semenisasi jalan dan drainase jalan desa	desa gong solok kec.malinau selatan hilir, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
26	Pembangunan jalan tani desa mentarang baru	Mentarang Baru, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
27	Peningkatan Pembangunan Rumah Ibadah Gereja GKPI Syallom Respen	Respen Tubu, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
28	Peningkatan Lapangan Futsal	Respen Tubu, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
29	Belum tersedia lapangan bola untuk kegiatan masyarakat (Penimbunan Lapangan Bola).	Desa Lobak Manis, Kab. Malinau		1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
30	Belum optimalnya perعتakan sawah	Kelompok Tani Usaha Bersatu Desa Malinau Kota RT. 02, Kab. Malinau		3 hektar	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
31	Jalan Tani tidak layak (Pembuatan Jalan Tani).	Antara Daerah Semenggol ke Sungai Kaliamok Desa Respen Tubu, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
32	Jalan Tani yang belum layak. Peningkatan Jalan dengan timbunan dan dilebarkan dengan 3 (tiga) Jembatan. Panjang jalan 350 Meter.	Jalan Tani RT. 06 Desa Malinau Hilir, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
33	Penerangan Desa yang belum layak (Sollar Sell terpadu).	Desa Rian Tubu, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
34	Penerangan Desa yang belum layak (Sollar Sell terpadu).	Desa Long Ranau, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
35	Penerangan Desa yang belum layak (Sollar Sell terpadu).	Desa Long Nyau., Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
36	Belum tersedia Alat Pertanian yang memadai (Pengadaan Hand Tractor).	Desa Respen Tubu dan Desa Malinau Kota RT 14 dan RT. 20., Kab. Malinau		10 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
37	Belum tersedia Rumah Ibadah (Pembangunan Baru Gereja GKPI Malinau Kota) yang Segnesentatif.	Desa Malinau Kota., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
38	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Malinau Kota., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
39	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Malinau Hulu., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
40	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Malinau Hilir., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
41	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Tanjung Keranjang., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
42	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Malinau Seberang., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
43	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Kaliamok., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
44	Bantuan Rumah Ibadah	Desa Kelapis., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD

45	Perbaikan Jalan Desa	Desa Tanjung Keranjang, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
46	BELUM TERTATA DENGAN BAIK AKSES JALAN YANG MEMADAI (PENINGKATAN JALAN KE PASAR IMBAYA).	RT. 09, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
47	BELUM TERBUKANYA AKSES JALAN YANG MENUJU KEDESA TERPENCIL (PEMBANGUNAN JALAN MENUJU DESA LONG MEKATIP).	Desa Long Mekatif, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
48	Jalan licin, bergelombang, jembatan sering rusak kalau musim hujan. (Peningkatan Jalan Tani (Agregat)).	Kelompok Tani Kemakmuran Desa Wisata Pulau Sapi., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
49	Jalan belum di Aspal/semenisasi (semenisasi sepanjang 150 meter).	Harapan Baru., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
50	Jalan/gang penghubung RT. 10 dengan RT. 8 belum semuanya disemenisasi (semenisasi sepanjang 155 meter x 4 meter)	RT. 10 Desa Pulau Sapi., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
51	Terjadi genangan air di musim hujan karena pembuangan air kurang lancar. (Pembangunan/Normalisasi Arur Kilu - Kilu 3 (Tiga) meter).	RT. 06 Desa Pulau Sapi., Kab. Malinau	Panjang sungai yang dinormalisasi	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
52	Rawan Kecelakaan, karena banyak bahan jembatan yang rusak (Rehab berat jembatan gantung).	Desa Pulau Sapi., Kab. Malinau	Panjang jembatan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
53	Terjadi longsor pada pondasi jembatan (Pemeliharaan jembatan).	Jalan Pelajar RT. 5 Desa Wisata Pulau Sapi., Kab. Malinau	Panjang jembatan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
54	Jalan ke SMAN 4 mengalami longsor (Pemasangan Siring sepanjang 20 meter).	SMAN 4, Kab. Malinau	Panjang siring yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
55	Pembangunan dan Pembinaan Petani belum maksimal (Pembangunan Pusat Pertanian Rakyat Sejahtera (PPRS)).	Desa Wisata Pulau Sapi., Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
56	Penerangan Listrik belum ada (Pembangunan PLTS Terpadu).	Desa Rian Tubu., Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
57	Bendungan air sawah mengalami kerusakan	Desa Lung Pala., Kab. Malinau	Jumlah bendungan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
58	Sepanjang pesisir sungai Desa Lidung Kemenci terjadi longsor (Pembangunan siring sepanjang 1.500 meter).	Desa Lidung Kemenci., Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
59	Akses Jalan Tani belum tersedia (Pembukaan Jalan Tani Singarang 3 (tiga) Km).	Desa Lidung Kemenci., Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
60	Jalan/gang mengalami rusak berat (Semenisasi sepanjang 130 meter).	Desa Harapan Baru., Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
61	Irigasi pembuangan air belum lancar, mengakibatkan hasil pertanian menurun karena air tergenang pada musim hujan (Pembangunan Irigasi dan Normalisasi anak sungai Tebereneng).	Kelompok Tani Sawah Tengah, Lumbu 1, Ba'Uned, Sanit dan Beduk Keliling., Kab. Malinau	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
62	Pembukaan lahan baru (12 ha.)	Rian Tubu., Kab. Malinau		1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
63	Solar Cell	Sungai Tubu, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	50 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
64	Belum tersedianya Jalan yang memadai sebagai akses bagi warga negara sekitar (Peningkatan Jalan dan Semenisasi sepanjang 85 meter).	Gang OMI RT. 12 Desa Malinau Hulu., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
65	Belum tersedianya Jalan Usaha Tani yang memadai, sehingga mengakibatkan mobilisasi hasil pertanian tidak maksimal (Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usah Tani).	Desa Seruyung., Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
66	Mengakibatkan mobilisasi hasil pertanian tidak maksimal (Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usah Tani).	Sembuak Warod, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
67	Mengakibatkan mobilisasi hasil pertanian tidak maksimal (Pembangunan dan Peningkatan Jalan Usah Tani).	Desa Putat, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
68	Perlunya pemanfaatan bangunan fasilitas yang terbengkalai (Rehabilitasi bangunan Rumah Potong Heewan (RPH) dan pengadaan sarana penunjang lainnya).	Desa Malinau Seberang., Kab. Malinau	Jumlah bangunan yang direhab	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
69	Perlunya peningkatan Jalan (Rehab Jaringan Irigasi tersier dan Optimalisasi Lahan).	Desa Respen Tubu., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
70	Perlunya peningkatan Jalan (Rehab Jaringan Irigasi tersier dan Optimalisasi Lahan).	Desa Putat., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
71	Perlunya peningkatan Jalan (Rehab Jaringan Irigasi tersier dan Optimalisasi Lahan).	Desa Malinau Seberang., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
72	Perlunya peningkatan Jalan (Rehab Jaringan Irigasi tersier dan Optimalisasi Lahan).	Desa Tanjung Keranjang., Kab. Malinau	Panjang jaringan irigasi yang direhab	1 paket	Diakomodir dalam Renja DPUPR-PERKIM	Pokir DPRD
73	Bantuan Rumah Ibadah (Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Ibadah).	Desa Langap, Kab. Malinau	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
74	BELUM TERTATA DENGAN BAIK LOKASI REKREASI WARGA, (LANDSCAPE TAMAN JOJO 7 X 100 METER)	RT. 2, Kab. Malinau	Jumlah bangunan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD

75	Sering terjadi banjir diwilayah Kuala Lapang apabila terjadi curah hujan yang tinggi. Hal ini mempengaruhi beberapa lingkungan RT tergenang banjir secara khusus RT. 04 Kuala Lapang dan juga lahan sawah masyarakat didesa Kuala Lapang dan Tanjung Lapang. oleh sebab itu sangat perlu dilakukan normalisasi/Siring Sungai Sedemarat sepanjang wilayah Kuala Lapang (Normalisasi/Siring Sungai Sedemarat 1 (satu) Km)	RT. 04 Kuala Lapang, Kab. Malinau	Panjang sungai yang di normalisasi	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
76	Jalan menuju bandara Mahak Baru dalam kondisi rusak (berlubang dan becek/licin) apabila hujan deras akan menyulitkan warga masyarakat dalam melakukan aktifitas. jalan ini juga merupakan satu-satunya jalan penghubung menuju bandara Mahak Baru Kec. Sungai Boh. sehingga perlu perhatian serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Pembangunan/peningkatan Jalan menuju Bandara Mahak Baru 245 meter x 6 meter).	Mahak Baru., Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
77	Akses Jembatan penghubung menuju Puskesmas, Sekolah SMA, dan menuju ke Sentra Pertanian Masyarakat kondisinya kurang memadai perlu direhab total (Pembangunan Jembatan Lalut Songan).	RT. 3 Desa Long Alango, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
78	Aspal Jalan dalam Desa Paya Seturan belum memadai (100 Meter)	Desa Paya Seturan, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
79	Antara Desa - desa Paya Seturan dan Desa Tanjung Nanga belum ada akses Jalan (Pembangunan Jalan antara Desa Paya Seturan - Desa Tanjung Nanga 1.950 Meter)	Desa Paya Seturan - Desa Tanjung Nanga, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
80	belum ada akses Jalan (Pembangunan Jalan antara Desa Paya Seturan - Desa Tanjung Nanga 1.950 Meter)	Desa Paya Seturan - Desa Tanjung Nanga, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
81	Jalan Usaha Tani Ngekem Fad Fad Kaliamok rusak berat karena hanya berupa jalan tanah dan jembatan kayu sudah rusak di beberapa titik (lapuk)	Terusan Jalan BBI tembus Batalyon Desa Kaliamok, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	5 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
82	Belum tersedianya akses Jalan menuju Lokasi Pertanian (Peningkatan Jalan Umum 8500 meter) menuju Desa Tanjung Nanga Kec. Malinau Selatan Hulu.	Desa Langap - Desa Tanjung Nanga., Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	1 paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
83	Jalan Tani Sungai Betung Kabiran belum ada peningkatan sehingga tidak bisa dilewati saat hujan dan menyulitkan petani mengangkut hasil pertanian	Kawasan pemukiman baru dan persawahan Kabiran RT 8 Pelita Kanaan, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	3 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
84	Bangunan Gereja yang ada tidak memadai, tidak cukup menampung jemaat, lahan sempit, lahan parkir tidak ada sehingga berulang kali menerima surat komplein masyarakat sekitar gereja	Jl. Ambo Junia Malinau Kota, Kab. Malinau	Jumlah bangun gedung yang dibangun	1 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
85	Belum tersedia akses jembatan beton dan gorong gorong di beberapa titik jalan usaha tani Ngekem Fad Fad terusan jalan BBI tembus Batalyon . Jembatan yang ada hanya jembatan kayu yang sudah lapuk dan membahayakan pengguna jalan	Desa Kaliamok, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	6 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
86	Tepian sungai sepanjang pemukiman dan tepi jalan utama Desa Semenggaris longsor dan sebagian dapur rumah warga telah longsor	Desa Semenggaris, Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	3 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
87	Jalan utama Ibu Kota Kecamatan sepanjang 200 Meter kondisinya rusak parah perlu dilakukan pemeliharaan	Desa Long Alango, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dipelihara	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
88	Penerangan/lampu Listrik belum tersedia di pemukiman baru Kabiran RT 08 Pelita Kanaan	Kabiran RT 08 Pelitakanaan, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	3 km	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
89	Pemukiman warga RT 2 Desa Long Berang berada di tepi sungai sehingga rawan longsor sehingga perlu pembuatan siring sepanjang tepi sungai	RT 2 Desa Long Berang, Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	300 meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
90	Dermaga Desa Lung Mekatif sudah tidak layak karena terbuat dari kayu sehingga perlu dibangun dermaga beton (8x12m)	Desa Lung Mekatip, Kab. Malinau		1 unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
91	Anak sungai Mentarang baru yang membelah kampung dangkal dan menyebabkan banjir saat hujan sehingga perlu dilakukan normalisasi anak sungai tersebut	Desa Mentarang Baru, Kab. Malinau	Panjang sungai yang dinormalisasi	500 meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
92	Jembatan Sungai Majakan kondisinya rusak berat sehingga perlu direhab total (Pembangunan Jembatan Sungai Majakan).	Desa Long Pujungan, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
93	Lahan Pertanian Masyarakat Desa Long Ketaman kebanyakan di seberang sungai Ketaman sehingga perlu untuk membangun Jembatan Gantung sebagai akses menuju sentra Pertanian.	Desa Long Ketaman, Kab. Malinau	Panjang jembatan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
94	Peningkatan akses jalan (semenisasi) menuju SDN 002 Mentarang	Desa Lidung Kemenci, Kab. Malinau	Panjang jalan yang ditingkatkan	100 meter	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
95	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS/Surya Sel)	Desa Lung Simau Desa Lung Gafid Desa Temalang, Kab. Malinau	Jumlah instalasi listrik yang tersedia	20 Unit	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
96	Pembangunan Semenisasi jalan desa Harapan Maju	Desa harapan Maju, Kab. Malinau	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
97	Pembangunan Pastori GKPI Syallom (Respen Tubu)	Respen Tubu, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
98	Pembangunan gedung Gereja Katolik Respen Tubu	Respen Tubu, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD

99	Pembangunan gedung Gereja GKPI Batu Lidung	Batu Lidung, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
100	Pembangunan Pastori GKPI Syallom (Respen Tubu)	Respen Tubu RT. 06, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
101	Pembangunan Pastori GKPI Respen Tubu	Respen Tubu RT, 3, Kab. Malinau	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
102	Pembuatan Penahan Longsor Siring Jembatan Desa Lidung Kemenci	Desa Lidung Kemenci, Kab. Malinau	Panjang Tanggul Sungai yang di bangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
103	Pembukaan Akses Jalan (Jalan Tani) Menuju lahan pertanian masyarakat Desa Lidung Kemenci	Desa Lidung Kemenci, Kab. Malinau	Panjang jalan yang dibangun	3 Kilometer	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD
104	Semenisasi Halaman Gereja GKII Lidung Kemenci	GKII Lidung Kemenci, Kab. Malinau	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	1 Paket	Belum termasuk dalam katagori mendesak/gawat. Dapat ditunda pembangunannya	Pokir DPRD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

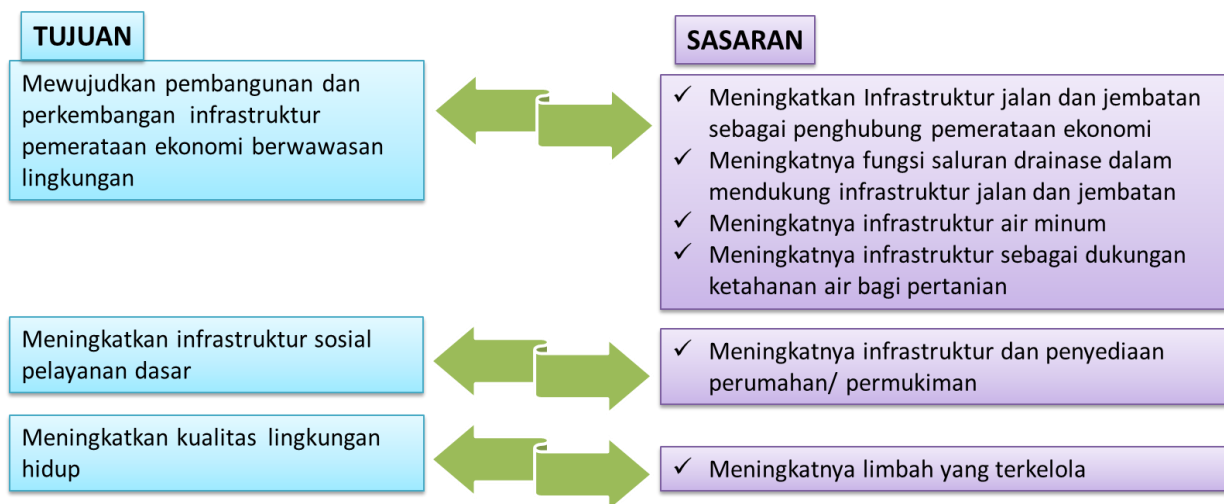
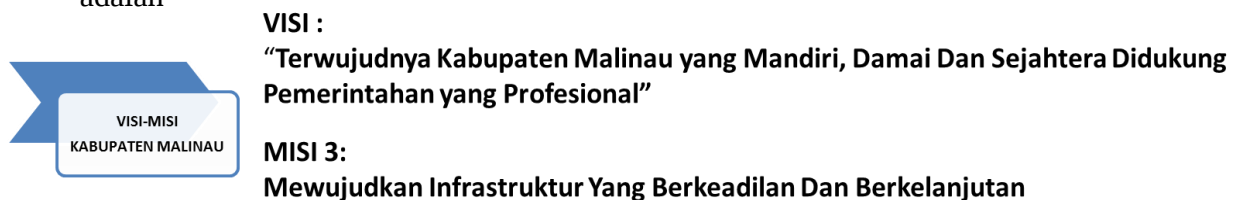
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kabupaten Malinau. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dalam melaksanakan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023, tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung pembangunan Kabupaten Malinau adalah



Dari tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah memenuhi apa yang menjadi misi oleh Pemerintah Daerah itu sendiri dan menuntaskan segala yang menjadi isu-isu strategis dalam pembangunan serta menyelaraskan program nasional maupun internasional

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam hal ini pemerintah telah membuat tema pembangunan daerah untuk tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yakni **“Pengembangan SDM, Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur yang Mendukung Penguatan Ekonomi Menuju Kemandirian, Kedamaian dan Kesejahteraan”**, maka yang menjadi prioritas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Kabupaten Malinau Tahun 2023:

1. Menurunkan Angka Kemiskinan.
2. Penguatan Ekonomi Local Dan Iklim Investasi Untuk Pemulihan Ekonomi.
3. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing SDM Untuk Mengkadapi Persaingan Global.
4. Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendukung Peran Dan Daya Saing.
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
6. Meningkatnya Penataan Kawasan Desa Yang Rapi, Tertib, Bersih, Sehat, Indah Dan Harmonis Yang disertai Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malinau tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten telah menyusun program dan kegiatan sebagaimana untuk mendukung prioritas Kabupaten Malinau, target SPM dan selaras dengan program global yaitu SDGs. Berikut prioritas pembangunan Kabupaten Malinau serta kaitannya dengan program Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman:

1. Program Pendukung Prioritas 4

Peningkatan Infrastruktur Untuk Mendukung Peran Dan Daya Saing dengan Program Prioritas:

- a) Program Penyelenggaraan Jalan
- b) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- c) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Selain program di atas yang telah menjadi prioritas pembangunan daerah, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten juga menyusun beberapa program lainnya yang mana menjadi sasaran dalam misi Kabupaten Malinau dan merupakan penyesuaian antara program pembangunan yang diarahkan dengan permasalahan kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur, serta relevansinya dengan perkembangan Kabupaten Malinau ke depan. Adapun kebijakan yang diambil diwujudkan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

Berdasarkan rumusan prioritas program dan kegiatan perangkat daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman maka disusun rencana kerja dan pendanaan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel T-C.33 berikut:

TABEL T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Malinau

OPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
1						2	3	4	5		7			
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
X	XX	01	0	00	00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Capaian Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota		100%				100%	
X	XX	01	2	02	00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan		100%				100%	
X	XX	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan tunjangan		88 orang	10.934.784.392	APBD		88 orang	10.934.784.392
X	XX	01	2	03	00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		100%				100%	
X	XX	01	2	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		12 Dokumen	1.180.529.960	APBD		12 Dokumen	1.180.529.960
X	XX	01	2	06	00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat daerah		64%				64%	
X	XX	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		9 Paket	66.496.000	APBD		9 Paket	66.496.000
X	XX	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		48 Paket	590.399.000	APBD		48 Paket	590.399.000
X	XX	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		37 Paket	555.715.000	APBD		37 Paket	555.715.000
X	XX	01	2	06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		5 Paket	176.019.620	APBD		5 Paket	176.019.620
X	XX	01	2	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		12 Paket	3.199.421.000	APBD		12 Paket	3.199.421.000
X	XX	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	500.000.000	APBD		20 Laporan	500.000.000
X	XX	01	2	07	00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		40%				40%	
X	XX	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		6 unit	11.238.640.000	APBD		6 unit	11.238.640.000
X	XX	01	2	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		24 Unit	66.611.709.000	APBD		24 Unit	66.611.709.000
X	XX	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15 Unit	936.375.000	APBD		15 Unit	936.375.000
X	XX	01	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		1 Unit	8.497.808.000	APBD		1 Unit	8.497.808.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
X	XX	01	2	09	00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45%				45%	
X	XX	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 unit	46.200.000	APBD		1 unit	46.200.000
X	XX	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	450.000.000	APBD		6 Unit	450.000.000
X	XX	01	2	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		27 Unit	1.000.000.000	APBD		27 Unit	1.000.000.000
X	XX	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		51 Unit	59.760.000	APBD		51 Unit	59.760.000
1	03	02	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		10,67%				10,67%	
1	03	02	2	01	00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Infrastruktur Pengendali Banjir yang terbangun		100%				100%	
1	03	02	2	01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		2 Dokumen	1.050.000.000	APBD		2 Dokumen	1.050.000.000
1	03	02	2	01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		575 Km	6.000.000.000	APBD		575 Km	6.000.000.000
1	03	02	2	01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		11.825 Km	12.635.000.000	APBD		11.825 Km	12.635.000.000
1	3	02	2	01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		3550 m	900.000.000	APBD		3550 m	900.000.000
1	03	02	2	02	00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas irigasi yang terbangun		100%				100%	
1	03	02	2	02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun		7.5 Km	4.036.509.000	APBD		7.5 Km	4.036.509.000
1	03	02	2	02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		125 Ha	1.081.782.000	APBD		125 Ha	1.081.782.000
1	03	03	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak		65,80%				65,80%	
1	03	03	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan		100%				100%	
1	03	03	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun		5 Dokumen	1.100.000.000	APBD		5 Dokumen	1.100.000.000
1	03	03	2	01	04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat		100 SR	24.000.000.000	APBD		100 SR	24.000.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
1	03	04	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah		0,92%				0,92%	
1	03	04	2	01	00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang dibangun		100%				100%	
1	03	04	2	01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		50 Rumah Tangga	200.000.000	APBD		50 Rumah Tangga	200.000.000
1	03	05	0	00	00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga bersanitasi layak		21,30%				21,30%	
1	03	05	2	01	00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SPALD S yang terbangun		100%				100%	
1	03	05	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun		1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
1	03	05	2	01	06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik		150 Rumah Tangga	1.399.993.700	APBD		150 Rumah Tangga	1.399.993.700
1	03	07	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		36,64%				36,64%	
1	03	07	2	01	00	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	
1	03	07	2	01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		15 Sistem Jaringan	55.144.090.954	APBD		15 Sistem Jaringan	55.144.090.954
1	03	08	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Capaian Penataan Bangunan Gedung		50%				50%	
1	03	08	2	01	00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan pemerintah dan sarana prasarana publik yang direhab		100%				100%	
1	03	08	2	01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG		1 Dokumen	249.872.000	APBD		1 Dokumen	249.872.000
1	03	08	2	01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		6 Dokumen	44.432.309.046	APBD		6 Dokumen	44.432.309.046
1	03	08	2	01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		12 Unit	17.900.000.000	APBD		12 Unit	17.900.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
1	03	09	0	00	00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Capaian Penataan Bangunan dan Lingkungannya		70%				70%	
1	03	09	2	01	00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase LPJU dan Pemakaman dalam Kondisi Baik		100%				100%	
1	03	09	2	01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	5 Kawasan	5.128.345.730	APBD			5 Kawasan	5.128.345.730
1	03	09	2	01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	65 unit	400.000.000	APBD			65 unit	400.000.000
1	03	10	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik		53%				53%	
1	03	10	2	01	00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase panjang jalan yang terbangun		100%				100%	
1	03	10	2	01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen	1.000.000.000	APBD			3 Dokumen	1.000.000.000
1	03	10	2	01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1 Dokumen	200.000.000	APBD			1 Dokumen	200.000.000
1	03	10	2	01	05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,53 Km	2.675.000.000	APBD			0,53 Km	2.675.000.000
1	03	10	2	01	08	Rekontruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	23.723 Km	94.937.962.999	APBD, DAK			23.723 Km	94.937.962.999
1	03	10	2	01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	0,2 Km	800.000.000	APBD			0,2 Km	800.000.000
1	03	10	2	01	12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	120 M	15.000.000.000	APBD			120 M	15.000.000.000
1	03	10	2	01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	120 M	2.866.000.000	APBD			120 M	2.866.000.000
1	03	10	2	01	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1 Dokumen	100.000.000	APBD			1 Dokumen	100.000.000
1	03	12	0	00	00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang		65%				65%	
1	03	12	2	01	00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang		100%				100%	
1	03	12	2	01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	APBD			1 Dokumen	100.000.000
1	03	12	2	01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	50.000.000

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
1	03	12	2	01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota		3 Dokumen	600.000.000	APBD		3 Dokumen	600.000.000
1	03	12	2	01	04	Sosialisasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang		1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
1	03	12	2	02	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Persetujuan dan Rekomendasi Rencana RDTR		100%				100%	
1	03	12	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
1	03	12	2	02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota		1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1	3	12	2	02	03	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat		1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1	03	12	2	03	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten Kota	Persentase capaian Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		100%				100%	
1	03	12	2	03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi Dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
1	03	12	2	03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang		2 Dokumen	274.999.457	APBD		2 Dokumen	274.999.457
1	03	12	2	04	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase capaian Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%				100%	
1	03	12	2	04	03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		1 Kasus	49.998.000	APBD		1 Kasus	49.998.000
1	3	12	2	04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		1 Dokumen	100.000.000	APBD		1 Dokumen	100.000.000
1	04	00	0	00	00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	04	02	0	00	00	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pengembangan Perumahan		55,80%				55,80%	
1	04	02	2	03	00	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi		100%				100%	
1	04	02	2	03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		7 unit	250.000.000	APBD		7 unit	250.000.000
1	04	03	0	00	00	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani		0,88%				0,88%	
1	04	03	2	03	00	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang di Tangani		0,88%				0,88%	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/ Pagu Indikatif
1	04	03	2	03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		70 Unit	3.000.000.000	APBD		70 Unit	3.000.000.000
1	04	03	2	03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi		1 Dokumen	200.000.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
						JUMLAH				404.605.719.858				404.605.719.858

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten Malinau merupakan Dokumen Perencanaan, yang menjabarkan potret permasalahan Pembangunan Kabupaten Malinau, serta daftar Program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang dimaksud, secara rencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dalam kerangka itu perlu terus dikembangkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggungjawab, sehingga hasil-hasil Pembangunan Daerah dapat benar-benar dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Malinau sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin dan untuk menuju Visi Kabupaten Malinau. Selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kabupaten Malinau mengharapkan agar Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2023 ini dapat menambah kewajiban akuntabilitas dan mewujudkan Visi dan Misi Organisasi guna peningkatan kinerja di masa mendatang.

Malinau, 18 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU



YOSEP, S.T

NIP. 19700401 200112 1 002